

LAPORAN PENELITIAN

PENELITIAN KOLABORASI ANTAR PERGURUAN TINGGI (PT)

MERDEKA BELAJAR DALAM PEMAKNAAN MINORITAS AHMADIYAH DI LOMBOK SERTA MAYORITAS AN-NAHDLIYAH DI MADURA; STUDI SOSIO IDEOLOGIS PADA PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI LEMBAGA PENDIDIKAN BERBASIS ORGANISASI KEAGAMAAN



OLEH:

RIDWAN (KETUA)

NO. ID. 203112650208330

MUH. AZKAR (ANGGOTA)

NO. ID. 083112850308000

MAIMUN (ANGGOTA)

NO. ID. 202009840108207

**AN BERBASITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
PUSAT PIABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
2023**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Solawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw., keluarga dan para sahabatnya. Atas semua kehendak-Nya, penelitian yang berjudul "**Merdeka Belajar dalam Pemaknaan Minoritas Ahmadiyah di Lombok Serta Mayoritas An-Nahdliyah di Madura; Studi Sosio Ideologis pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Lembaga Pendidikan Berbasis Organisasi Keagamaan**" dapat terselesaikan,

Laporan penelitian ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada TIM LP2M UIN Mataram, *Reviewer*, juga kepada para sumber data yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran.

Tim Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, dan memiliki kekurangan dari berbagai aspek. Untuk itu, kritik dan saran yang konstruktif demi perbaikan laporan penelitian ini sangat diharapkan.

Akhirnya harapan dan doa kepada Tuhan YME agar laporan penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan peningkatan kualitas hidup beragama, berbangsa dan bernegara.

Jakarta, 8 September 2023

Tim Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Pengesahan	ii
Daftar Isi	iii
Kata Pengantar	iv
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	
B. Rumusan Masalah	
C. Tujuan Penelitian	
D. Manfaat Penelitian	
E. Kajian Pustaka	
F. Kajian Teori	
G. Metode Penelitian	
BAB II: PEMAANAAN SISWA AHMADIYAH TERHADAP MERDEKA BELAJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	
BAB III: PEMAANAAN SISWA AHMADIYAH TERHADAP MERDEKA BELAJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	
BAB IV: IMPLIKASI PEMAANAAN SISWA AHMADIYAH DAN SISWA ANNAHDHIYAH TERHADAP MERDEKA BELAJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	
BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan	
B. Saran	
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDEDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemerdekaan berfikir merupakan esensi yang dipersyaratkan oleh Nadiem Makarim, menteri pendidikan dan kebudayaan era Presiden Jokowi tahap 2 bagi para guru sebelum memberikan pengajaran pada siswa. Guru diharapkan mampu membawa nuansa merdeka dengan paradigma berfikirnya yang merdeka terlebih dahulu sehingga mampu menciptakan ruang yang sinergi dengan cara berfikirnya sendiri. Kurikulum merdeka sebagai konsepsi nasional dalam konteks pendidikan memang membutuhkan tenaga edukatif yang sesuai sehingga mampu mentransmisikannya dengan baik, sesuai cita-cita pendidikan nasional. Begitu kira-kira gambaran awal dari luasnya konsep merdeka belajar yang digagas oleh pemerintah untuk mewujudkan Indonesia emas di masa yang akan datang.

Penulis menilai bahwa kondisi bangsa yang rentan dengan perpecahan, konflik dan disintegrasi menjadi motif di samping kesadaran akan bakat dan minat siswa sebagai sandaran paling mendasar dalam kebutuhan pendidikan mereka. Memang harus diakui bahwa kemerdekaan siswa dalam arti mendasarkan pembelajaran pada bakat dan minat mereka adalah tujuannya. Tapi kondisi bangsa yang mudah terpolakan dalam kutub yang saling berseberangan adalah tujuannya yang lain, kalau tidak mau disebut sebagai tujuan yang sesungguhnya, kondisi dimana bangsa Indonesia menjadi lebih terbuka dan saling berterima antara yang satu dengan lainnya sekalipun berbeda haluan, ideologi bahkan dalam kepercayaan.

Melihat tujuan-tujuan ini, tentu bisa kita pastikan bahwa gagasan merubah kurikulum dengan menggunakan diksi tujuannya sehingga menjadi kurikulum merdeka adalah langkah yang cerdas dan peka terhadap tuntutan peradaban manusia khususnya dalam konteks Indonesia, suatu daerah yang notabene terdiri dari banyak suku, bangsa dan ragam kerpercaannya. Melalui pemikirannya yang panjang, Althusser memperkirakan bahwa ideologi, baik itu berupa agama ataupun kepercayaan lainna diestimasi menjadi pemicu kesenjangan bahkan konflik sosial di selain faktor ekonomi

sebagaimana keyakinan Karl Marx, bahwa konflik sosial seringkali lahir disebabkan adanya kesenjangan faktor ekonomi yang kemudian memunculkan kelas-kelas sosial antara kaum proletar dan kaum borjuis yang bersifat diametral dan subordinatif (Brewer, 2016). di luar faktor ekonomi ini, -merujuk pada pandangan Althusser-kepercayaan, emosi keagamaan dan ideologi menjadi faktor yang paling serius dalam melahirkan konfrontasi dan konflik sosial (Fariyah, 2015; Panae dan Islahuddin, 2020), bahkan ruang lingkup yang dimilikinya melibatkan konflik internal dalam satu agama yang sama (Hanafi, 2018; Karlina Supelli, 2013). Salah satu contohnya adalah konflik antara NU vs Syi'ah yang terjadi di Kabupaten Sampang Madura Jawa Timur (Ulum, 2018), atau kasus Ahmadiyah yang terjadi di Mataram Nusa Tenggara Barat.

Berbicara tentang NU, tidak bisa dipungkiri bahwa ia merupakan organisasi keagamaan mayoritas di Madura dengan lembaga pendidikan yang tersebar di berbagai daerah baik pelosok desa ataupun kota. Keberadaan NU di Madura diakui sangat natural. Bahkan lembaga-lembaga pendidikan yang tidak berafiliasi secara structural formal pun mengidentifikasi diri sebagai NU.

Tidak dapat dipungkiri, bahwa lembaga pendidikan merupakan wadah transmisi ideologi. Transmisi ideologi ke-NU-an dari satu generasi ke generasi berikutnya, salah satu medianya adalah lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan LP Ma'arif NU. Lembaga-lembaga pendidikan ini memiliki kurikulum yang berbasis pada orientasi pendidikan nasional tetapi dengan menambahkan muatan lokal yang bersifat wajib, utamanya pada mata pelajaran aswaja dan ke-NU-an, suatu materi pembelajaran pendidikan agama Islam yang diorientasikan untuk internalisasi nilai-nilai keorganisasian yang bersifat eksklusif dan menjadi harga mati bagi mereka, seharga dengan niat mempertahankan NKRI.

Pada saat yang bersamaan, lembaga-lembaga pendidikan NU di Madura secara kuantitatif tidak sebesar pengaruh kulturalnya. Lembaga-lembaga pendidikan NU sepi peminat. SMA Wahid Hasyim misalnya yang terletak di tengah Kota Pamekasan bahkan hanya diisi oleh 5 orang siswa satu kelasnya. Sekolah ini hampir saja gulung tikar. Keberadaan lembaga-lembaga pendidikan di NU layaknya minoritas di tengah mayoritas. NU di Madura besar secara kultural, tetapi kecil secara formal pendidikan.

Minat siswa mayoritas NU bersekolah di sekolah-sekolah berafiliasi NU berbanding terbalik dengan minat para siswa minoritas untuk bersekolah di sekolah-sekolah Ahmadiyah. Jika di Madura, lembaga pendidikan NU bagi sebagian besar siswa, menjadi pilihan kedua, maka berbeda dengan minoritas Ahmadiyah di Mataram yang mendambakan dapat bersekolah di sekolah-sekolah sendiri yang berafiliasi Ahmadiyah seperti Sekolah Al-Wahid di Bogor. Dapat dikatakan siswa An-Nahdhiyah di sekolah sendiri tidak lebih seperti siswa Ahmadiyah yang bersekolah di sekolah orang lain (mayoritas).

Ahmadiyah sebagai organisasi minoritas juga menjadi catatan khusus yang mewarnai dinamika pendidikan bangsa yang katanya berasaskan Pancasila dengan Bhinneka Tunggal Ika-nya. Apa yang terjadi di Lombok tentang penolakan terhadap keberadaan kaum Ahmadiyah serta konflik fisik yang masih rentan terjadi mulai tahun 1983 hingga saat ini menyisakan ruang ketidakberterimaan bahkan dalam lembaga pendidikan yang mempertemukan mereka yang mayoritas dan Ahmadiyah yang minoritas dalam satu ruang yang sama. Kondisi ini memungkinkan munculnya beban psikologis yang mendalam terutama dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, materi yang bersentuhan langsung dengan eksistensi dan kepercayaan mereka masing-masing.

Secara ideal, perbedaan pemahaman keagamaan seharusnya tidak boleh menjadi pemicu timbulnya konflik sosial. Bukan hanya karena menimbulkan disintegrasi bangsa tetapi juga larangan dalam agama. Islam telah memberikan pedoman bahwa perbedaan itu *sunnatullah*, membawa *rahmah* dan sumber renungan kesabaran dalam perasaan saling berterima, sehingga siapapun yang mampu menjalankannya mendapatkan pahala yang begitu besarnya (Abshor dan Khotimah, 2020).

Jika ideologi NU didukung oleh pemerintah melalui kurikulum resmi dan lembaga-lembaga pendidikan formal milik pemerintah, berbeda halnya dengan Ahmadiyah dan minoritas lainnya. Di sekolah-sekolah negeri terutama sekali, kelompok-kelompok minoritas diharuskan beradaptasi secara sosial untuk berbaur dan

berinteraksi dengan kelompok mayoritas. Pun demikian, secara ideologis, mereka harus mengikuti pelajaran-pelajaran agama yang tidak sejalan dengan keyakinannya.

Memang tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian kelompok memilih lembaga pendidikan didasarkan atas kesadaran. Misalnya banyak di antara simpatisan NU yang memilih bersekolah di sekolah-sekolah Muhammadiyah, atau simpatisan Muhammadiyah yang memilih sekolah berafiliasi NU. Namun, pada kasus kelompok minoritas yang lain, juga memilih bersekolah di sekolah-sekolah mayoritas disebabkan oleh ketiadaan dan keterbatasan akses pendidikan semisal lokasi yang jauh.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji fenomena dua kelompok yang berbeda nasib ini, antara NU sebagai kelompok mayoritas dan Ahmadiyah sebagai kelompok minoritas terutama berkaitan dengan pemaknaannya terhadap pembelajaran pendidikan agama Islam yang mereka terima.

Jika siswa NU di Madura dan siswa Ahmadiyah di Lombok yang sama-sama berangkat dari “keterpaksaan” karena ketidakmampuan memilih sekolah prioritas, maka dapatkah selanjutnya mereka melakukan interaksi pembelajaran yang maksimal. Menjadi menarik untuk mengkaji bagaimana mereka melakukan eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi Pendidikan Agama Islam di sekolah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemaknaan siswa minoritas Ahmadiyah di Lombok terhadap merdeka belajar pembelajaran Pendidikan Agama Islam
2. Bagaimana pemaknaan siswa mayoritas An-Nahdhiyah di Madura terhadap merdeka belajar pembelajaran Pendidikan Agama Islam?
3. Bagaimana implikasi pemaknaan merdeka belajar siswa Ahmadiyah di Madura dan siswa An-Nahdhiyah terhadap pembelajaran Pendidikan Agama Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas, adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan pemaknaan siswa minoritas Ahmadiyah di Lombok terhadap merdeka belajar pembelajaran Pendidikan Agama Islam.
2. Menjelaskan pemaknaan siswa mayoritas An-Nahdhiyah di Madura terhadap merdeka belajar pembelajaran Pendidikan Agama Islam.
3. Menjelaskan implikasi pemaknaan merdeka belajar siswa Ahmadiyah di Madura dan siswa An-Nahdhiyah terhadap pembelajaran Pendidikan Agama Islam.

D. Kajian Terdahulu yang Relevan

Beberapa penelitian terdahulu tentang mayoritas dan minoritas di sekolah dilakukan di antaranya oleh Sulanam (2022). Sulanam dalam penelitiannya menemukan bahwa siswa minoritas di sekolah melakukan upaya adaptasi dan negosiasi. Adaptasi dilakukan dengan tujuan mempertahankan diri di lingkungan baru. Sedangkan negosiasi dilakukan secara bertahap melalui proses pembiasaan sikap simbolik agama, yang ditunjukkan melalui interaksi terbuka dan negosiasi melalui sikap yang tegas, yang ditunjukkan melalui pengungkapan identitas secara tegas di hadapan mayoritas. Selain adaptasi dan negosiasi, siswa minoritas tetap identitas siswa minoritas tetap mempertahankan identitas di sekolah yang ditunjukkan oleh nama, penggunaan symbol, ekspresi dan aksesoris keagamaan yang dipakai oleh siswa minoritas. Negosiasi dilakukan dengan cara *step by step negotiation*, *win-win negotiation*, dan *clear negotiation*; dan pada proses pembentukan identitas terjadi melalui ekspresi keberagaman yang ditandai dengan munculnya ekspresi identitas yang melekat sebagai bawaan dari lingkungan keluarga, ekspresi melalui simbol keagamaan, dan ekspresi spontan melalui komunikasi verbal, sikap, dan perilaku.

Sulanam (2022) juga menemukan bahwa agama memainkan peranan penting dalam proses adaptasi yang dilakukan oleh siswa minoritas, yang ditunjukkan melalui proses komunikasi antara siswa minoritas dan mayoritas secara mendalam. Selain itu penelitian ini juga menemukan adanya modal komunikasi selain agama, seperti komunikasi atas dasar kesukaan dan tingkat *chemistry* di antara siswa minoritas dan mayoritas. Berdasarkan konteks geografis sekolah, penelitian ini menyimpulkan bahwa pada lingkungan yang memiliki ketaatan beragama yang kuat, peran agama sangat

penting dalam proses adaptasi, karena bagi siswa, perbedaan keyakinan tersebut dapat pula menjadi sesuatu yang menarik untuk dipertukarkan (*knowledge sharing*).

Marzuki dan Fikri (2022) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa relasi antara minoritas dan mayoritas terjadi dengan beberapa pola. Pola sosial asosiatif terjadi pada Sekolah Menengah Umum di Aceh dan Sulawesi Utara, sedangkan pola relasi sosial disosiatif terjadi pada Sekolah Menengah Umum di Bali. Pola relasi sosial yang terbentuk terhadap minoritas agama di sekolah-sekolah di tiga daerah tersebut yaitu Aceh, Bali dan Sulawesi Utara dapat berimplikasi spiritual, psikologis dan sosiologis.

Kasus minoritisasi di lembaga pendidikan tidak hanya dialami oleh Ahmadiyah. Irzum Fariyah dan Afina Izzati dalam penelitiannya menjelaskan tentang perbedaan kebijakan sekolah terhadap siswa dari Kaum Samin. Persoalan yang terjadi adalah tidak diakuinya kepercayaan Warga Samin dalam sistem administrasi. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa Kaum Samin (Sedulur Sikep) sendiri sudah mulai beradaptasi dengan terbuka dan menerima aturan-aturan dari pemerintah. Kaum Samin berusaha menerima agama mayoritas dan mengikuti aturan yang berlaku di masyarakat meskipun sebenarnya mereka tetap ingin memperoleh hak yang sama atas kepercayaan dan keyakinan yang dianutnya.

Amin Muzakkir (2011), dalam konteks Ahmadiyah menyebut bahwa minoritisasi Ahmadiyah di Indonesia merupakan fenomena yang terjadi pasca reformasi. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa kondisi yang memungkinkan proses minoritisasi dapat berlangsung ada dua, yaitu menguatnya kelompok Islam radikal dan lemahnya kepemimpinan politik pemerintah.

Minoritisasi Ahmadiyah berlangsung juga di beberapa daerah. Desentralisasi yang menjadi salah satu kata kunci dalam politik Indonesia pasca-Soeharto dalam kenyataannya bisa juga berarti penyebaran sentralisasi dari pusat ke daerah. Pemimpin daerah semestinya memiliki peranan penting, tetapi nyatanya tidak jauh berbeda dengan pemimpin di atasnya. Desentralisasi juga telah menimbulkan representasi yang berlebihan. Di luar arena politik formal, kelompok antiAhmadiyah semakin leluasa mengemukakan pandangannya terhadap kesesatan Ahmadiyah, bahkan seringkali

dengan melalui tindak kekerasan. Respon pemerintah terhadap persoalan ini hamper tidak ditemukan.

Wahyudi (2015) dcalam penelitiannya tentang peminggiran Ahmadiyah mengungkap bahwa Ahmadiyah melakukan penyesuaian tindakan sosial di masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan serangkaian realitas, yaitu: (1) bahwa mereka memiliki dasar keyakinan yang kokoh, sehingga dalam situasi tertekan pun, tidak mudah melemah; (2) peminggiran atau minoritisasi yang dialami justru dipandang sebagai potensi yang dapat meningkatkan semangat kolektifitas yang makin terorganisir dan menjadikan gerakannya semakin eksis baik dengan atribut-atribut komunitasnya atau tanpanya; (3) gerakan akomodatif yang dilakukan oleh Ahmadiyah berkontribusi positif dalam menjaga stabilitas Negara dan dapat mengembangkan kegiatan kemanusiaan; dan (4) adanya kemampuan Ahmadiyah dalam mengorientasikan gerakannya melalui mekanisme pemaknaan kembali terhadap keyakinannya dapat membuka ruang akomodatif yang signifikan. Proses penyesuaian diri yang dilakukan oleh kelompok minoritas Ahmadiyah nyatanya justeru memperkuat ketahanan sosial mereka.

Beberapa penelitian tersebut di atas, menyebutkan bahwa minoritisasi masih saja terjadi, di lembaga-lembaga pendidikan bahkan. Minoritas seakan dipaksa untuk beradaptasi dengan lingkungan mayoritas, tidak hanya secara sosial namun juga ideologis. Minoritas dipaksa dengan aturan-aturan yang ada, untuk menerima segala apa yang datang dari mayoritas, walaupun kerap kali bertentangan dengan keyakinan yang dianutnya. Minoritisasi ini tidak lepas dari pengaruh politik dimana Indonesia menganut system demokrasi. Mayoritas dan minoritas tidak hanya menunjuk pada kuantitas, tetapi juga berimplikasi pada kebijakan-kebijakan politik pada aspek sosial, budaya, agama dan pendidikan.

Berbeda dengan beberapa penelitian di atas, yang melakukan kajian pada konteks politik, sosial kemasyarakatan, kajian ini dilakukan pada lembaga pendidikan dengan menjadikan materi pendidikan sebagai kajian utama. Pada aspek pendidikan, tidak banyak penelitian yang mengkaji tentang minoritisasi tersebut. Keberterimaan kelompok-kelompok minoritas di lembaga-lembaga pendidikan terhadap materi

pendidikan yang ada amat jarang disinggung. Berdasarkan hal demikian, penelitian ini akan memfokuskan kajian pada persoalan tersebut yaitu pada pemknaan para siswa kelompok minoritas terhadap materi pembelajaran di sekolah. Selain kajian pada siswa minoritas, sebagai bahan perbandingan, penelitian ini juga akan melakukan kajian terhadap pemaknaan siswa mayoritas NU di sekolah-sekolah di Madura.

Jika ideologi NU didukung oleh pemerintah melalui kurikulum resmi dan lembaga-lembaga pendidikan formal milik pemerintah, berbeda halnya dengan Ahmadiyah dan minoritas lainnya. Di sekolah-sekolah negeri terutama sekali, kelompok-kelompok minoritas diharuskan beradaptasi secara sosial untuk berbaur dan berinteraksi dengan kelompok mayoritas. Pun demikian, secara ideologis, mereka harus mengikuti pelajaran-pelajaran agama yang tidak sejalan dengan keyakinannya.

E. Konsep dan Teori yang Relevan

1. Merdeka Belajar

Belajar sesungguhnya bisa diposisikan sebagai upaya memenuhi kebutuhan hidup terutama pada aspek kognitif, afektif dan psikomotorik, unsur fundamental kemanusiaan yang melekat dalam berbagai situasi dan kondisi. Kondisi ini mengharuskan adanya pola yang fleksibel dan bersifat alamiah, suatu pola yang mendasarkan semuanya pada kebebasan individu dan kehendak alamiahnya untuk memungkinkan segenap potensi alami yang dimiliki individu bisa teraktualisasikan dengan baik. Orientasi ini kemudian diterjemahkan dalam pendekatan dan kebijakan nasional sebagai merdeka belajar.

Merdeka belajar adalah kebijakan yang dibuat pemerintah untuk memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia, suatu lompatan besar agar menghasilkan siswa atau peserta didik dan lulusan yang unggul terutama dalam menghadapi tantangan masa depan yang sangat kompleks. Secara substansi, inti dari merdeka belajar adalah kemerdekaan dalam berpikir terutama bagi guru dan siswa. Merdeka belajar mengarah pada terbentuknya karakter dan jiwa merdeka baik dari guru ataupun siswa sehingga mampu mengeksplorasi pengetahuan secara leluasa dan menyenangkan. Merdeka belajar tidak hanya mampu mendorong siswa dalam belajar dan mengembangkan dirinya, tetapi juga membentuk sikap dan rasa peduli terhadap lingkungan,

menumbuhkan kepercayaan diri, menumbuhkan keterampilan serta mudah melakukan adaptasi dengan lingkungan masyarakatnya (Ainia, 2020).

Merdeka Belajar menjadi program kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI yang baru yaitu Mendikbud Nadiem Anwar Makarim. Ia membuat kebijakan ini beberapa pertimbangan, diantaranya hasil penelitian PISA tahun 2019 atau Programme for International Student Assessment menunjukkan bahwa hasil penilaian terhadap peserta didik di Indonesia hanya berada di peringkat keenam (6) dari bawah. Oleh karena itu, menteri Nadiem membuat gebrakan penilaian untuk kemampuan minimum; literasi, numerasi, dan survei karakter. Literasi meliputi pengukuran kemampuan membaca dan menganalisis isi bacaan serta memahami konsep-konsepnya. Adapun kemampuan numerasi dinilai dari kemampuan peserta didik dalam mengimplementasikan konsep numerik ke dalam kehidupan yang nyata. Sedangkan survei karakter adalah pencarian sejauh mana implementasi nilai budi pekerti, pancasila dan agama dipraktekkan oleh peserta didik, bukanlah sebuah tes (Daga, 2021).

Menurut Nadiem Makarim, esensi kemerdekaan berpikir itu harus didahului oleh kemerdekaan berfikir para guru sebelum memberikannya pada peserta didik. Nadiem menyebutkan bahwa dalam kompetensi guru pada jenjang apapun, tanpa adanya upaya menerjemahkan kompetensi dasarnya dan kurikulum yang ada, maka tentu tidak akan ada pembelajaran yang akan terjadi. Sistem pengajarannya juga akan berubah dari pembelajaran yang bernuansa di dalam kelas menjadi pembelajaran di luar kelas. Nuansa pembelajaran diyakini akan lebih bagus dan lebih nyaman, karena peserta didik bisa berdiskusi dengan guru secara lebih terbuka, tidak hanya mendengarkan pemaparan guru, tetapi juga lebih memungkinkan untuk membentuk karakter mereka yang berani, cerdas, mandiri, mudah bergaul, berkompetensi, beradab, sopan, dan tidak mengandalkan sistem ranking yang bisa meresahkan anak serta orang tua, karena sesungguhnya setiap anak memiliki bakat dan kemampuannya masing-masing.

Secara teknis ada empat hal pokok yang menjadi kebijakan baru Kementerian pendidikan dan kebudayaan RI;

- a. Ujian Nasional (UN) diganti dengan Asesmen Kompetensi Minimum serta Survei Karakter. Asesmen lebih menekankan pada kemampuan literasi dan numerik dengan berdasar pada praktik terbaik tes PISA. Hal ini berbeda dengan Ujian Nasional yang dilakukan di akhir jenjang pendidikan, sedangkan asesmen dilakukan pada kelas 4, 8, dan 11.
- b. Ujian Sekolah Berstandar Nasional atau yang biasa disebut USBN diserahkan ke sekolah. sekolah diberikan kebebasan untuk menentukan penilaian apakah pada karya tulis, portofolio, atau penugasan lainnya.
- c. RPP disederhanakan. RPP cukup satu halaman. Tujuannya pada penyederhanaan administrasi, sehingga guru memiliki lebih banyak waktu untuk kegiatan belajar mengajar serta peningkatan kompetensi.
- d. Penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada sistem zonasi diperluas kecuali daerah 3T. Peserta didik yang menempuh melalui jalur prestasi dan afirmasi, diberikan kesempatan lebih banyak daripada sistem PPDB. Pemerintah daerah diberikan hak dan kewenangan untuk menentukan daerah zonasinya (Mustagfiroh, 2020).

Pada tataran pemaknaan, makna Merdeka Belajar memiliki implikasi yang kuat baik untuk guru ataupun siswa, yaitu; merdeka berpikir, merdeka berinovasi, merdeka belajar mandiri dan kreatif, serta merdeka untuk kebahagiaan. Makna kemerdekaan yang pertama ini menjadi inti dari kemerdekaan yang lain, yaitu pada terbentuknya kemerdekaan berfikir. Merdeka berpikir merupakan kondisi pikiran yang mampu memahami kemerdekaan dalam mendesain ataupun melaksanakan proses pembelajaran, serta menemukan orientasi dasar berupa berkembangnya keberanian dan kebebasan dalam berpikirnya.

Sesungguhnya berpikir itu merupakan aktivitas akal budi manusia dalam menangkap realitas luar dirinya sehingga mampu menemukan kebenarannya. Kemampuan manusia dalam menangkap kebenaran secara obyektif mungkin terjadi apabila dilingkupi dengan kebebasan berpikirnya.

Kedua, merdeka berinovasi. Makna yang terkandung di dalamnya adalah kemerdekaan dalam merancang sesuatu yang baru. Penciptaan nilai merupakan hal sangat penting dalam dunia pendidikan, dan nilai yang diciptakan adalah perbedaan

antara keadaan yang sebelumnya dengan keadaan sesudahnya. Dalam konteks ini, pembelajaran inovatif bisa juga bermakna sebagai kreativitas dan kebaruan pendidik dalam merancang gaya dan metode pembelajaran. Guru harus menerapkan gagasan baru, metode yang kreatif, dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kemampuan siswa.

Ketiga, merdeka belajar mandiri dan kreatif. Belajar mandiri dapat dilihat dari dua perspektif, meliputi belajar mandiri sebagai proses atau metode di satu sisi dan belajar mandiri sebagai katakteristik pribadi siswa. Sebagai proses atau metode makna belajar mandiri berarti tanggungjawab siswa untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan belajarnya serta mengevaluasi hasil belajarnya. Sedangkan sebagai karakteristik pribadi, makna belajar mandiri mengharuskan siswa bertanggungjawab serta aktif dalam berbagai proses belajar, bersifat terbuka, memiliki inisiatif dan tujuan belajar serta memiliki kemampuan dalam menyelesaikan masalah belajarnya baik di sekolah maupun di luar sekolah.

Keempat, Merdeka belajar untuk Kebahagiaan. Kebahagiaan, kesenangan dan rasa nyaman menjadi tujuan pembelajaran, sehingga kebijakan merdeka belajar mengarah pada program menciptakan iklim belajar yang sangat menyenangkan dengan terbentuknya suasana bahagia baik bagi guru lebih-lebih bagi siswa. Spiritnya adalah belajar mengajar tanpa merasa terbelenggu (Daga, 2021).

2. Ahmadiyah

Ahmadiyah merupakan sekte yang dinisbatkan kepada Islam, berasal dari Qadian India. Kelahiran Ahmadiyah pada 23 Maret 1889 berawal ketika Mirza Ghulam Ahmad mengaku telah mendapatkan ilham dari Allah. Mirza Ghulam Ahmad mendeklarasikan berdirinya organisasi al-Jama'ah al-Islamiyah al-Ahmadiyah (Jamaah Islam Ahmadiyah) dengan membaiat 40 orang pengikut. Pembaiatn pertama dilakukan oleh Maulana Nuruddin Sahib sekaligus menyatakan bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah pendiri Ahmadiyah. (Zulkarnain: 2005)

Keyakinan pokok Ahmadiyah yang membedakannya dengan mayoritas Islam adalah pengakuan bahwa ada nabi setelah Nabi Muhammad Saw yaitu Mirza Ghulam Ahmad. Jika mayoritas umat Islam meyakini bahwa pintu kenabian telah tertutup,

berbeda halnya dengan Ahmadiyah. Bagi Ahmadiyah, yang berakhir hanyalah nabi pembawa syariat, tetapi nabi-nabi yang tidak membawa syariat tetaplah ada. Menurut mereka Mirza Ghulam Ahmad adalah seorang nabi *ghairu tasyri'* dan bukanlah nabi pembawa syariat seperti Nabi Muhammad. Posisi *nabi ghairu tasyri* seperti Mirza Ghulam Ahmad adalah memperkuat dan memastikan keberlangsungan syariat yang dibawa oleh nabi sebelumnya yaitu Nabi Muhammad.

Selain perbedaan interpretasi mereka terhadap kata "*Khataman Nabiyyin*" (nabi penutup), Ahmadiyah juga berbeda pada keyakinan terhadap Nabi Isa. Ahmadiyah mempercayai bahwa Nabi Isa telah wafat, bukan diangkat ke langit seperti keyakinan mayoritas umat Islam. Argumen ini didasarkan pada kata *khatam* yang menurut mereka tidaklah harus berarti penutup, tapi juga bisa berarti stempel, cincin dan orang yang mulia. Hal ini membawa pada keyakinan penganut Ahmadiyah bahwa *khataman nabiyyin* itu memang ada al-Qur'an, dan benar bahwa Nabi Muhammad adalah nabi terakhir. Kehadiran Mirza Ghulam Ahmad adalah sebagai penerus dan pengawal syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Hal ini merupakan keharusan sejarah apalagi dalam keyakinan umat Islam bahwa dalam setiap masa akan lahir seorang *mujaddid* atau pembahru (Zulkarnain, 20025; Ishomuddin; 2012)

Ajaran pokok Ahmadiyah pada umumnya sama dengan mayoritas Islam. Selain mengaku sebagai seorang nabi, Mirza Ghulam Ahmad juga mengaku sebagai *al-Masih al-Mauud*, Imam Mahdi yang dinantikan kedatangannya. Imam Mahdi sendiri, menurut mayoritas umat Islam akan dibangkitkan menjelang hari kiamat. Kebangkitan Imam Mahdi menurut mayoritas, menjadi salah satu pertanda dekatnya hari kiamat. Selain keyakinan akan Isa al-Masih, Imam Mahdi, juga Ahmadiyah dalam hal ibadah, melarang pengikutnya untuk salat di belakang nonAhmadi. Salat di belakang nonAhmadi menurut mereka tidak sah (Ishomuddin, 2012)

Ajaran Mirza Ghulam Ahmad ini berkembang dan tersebar ke berbagai negara lain seperti Inggris, Amerika, Jerman dan juga Indonesia. di Indonesia khususnya, Ahmadiyah pertama kali masuk dibawa oleh tiga orang Sumatera Barat yang pergi ke India tahun 1922, yaitu siswa Sumatera Thawalib Abu Bakar, Ahmad Nuruddin, dan Zaini Dahlan. Ahmadiyah yang masuk ke Indonesia ada dua golongan, yaitu

Ahmadiyah Qadian dan Lahore. Ahmadiyah aliran Qadian mempercayai Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi yang wajib ditaati segala perintahnya dan sebagai Imam Mahdi. Berbeda dengan Qadian, Ahmadiyah Lahore yang menganggap Mirza Ghulam bukanlah seorang nabi, ia hanya seorang mujaddid dan juga sebagai Imam Mahdi (Zulkarnain. 2005).

3. Nahdlatul Ulama (NU)

NU merupakan organisasi keagamaan kemasyarakatan terbesar di Indonesia yang didirikan pada 16 Rajab 1344 H bertepatan dengan tanggal 13 Januari tahun 1926 di Surabaya. Di antara tokoh-tokoh yang mendirikan NU adalah; K.H. Hasyim Asy'ari, K.H. Ridwan, K.H. Bisri dan lain sebagainya. Gerakan NU lebih mementingkan pada aspek pendidikan dan pengajaran agama Islam melalui pendirian madrasah. Organisasi Islam yang didirikan oleh para ulama ini menjadi pemikiran yang maju pada zamannya. Ada tiga macam unit kegiatan di bawah pengurus umum syariah dan tanfidziyah:

- a. Badan Otonom (Banom). Badan otonom merupakan unit kegiatan yang memiliki tugas mengurus organ kelompok tertentu dalam NU meliputi; gerakan pemuda Ansor, muslimat NU, fatayat NU, Ikatan Pelajar Puteri Nahdlatul Ulama (IPPNU), Ikatan Pelajar Putera Nahdlatul Ulama (IPNU), Sarekat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi), dan lain sebagainya.
- b. Lembaga. Lembaga ini merupakan unit kegiatan yang memiliki tugas mengurus sebagian program-program NU di berbagai tingkatan masing-masing. Lembaga NU ini di antaranya; lembaga perekonomian, lembaga dakwah, Rabithah Maahid Islamiyah, lembaga pengembangan pertanian, lembaga Ma'arif, dan lain sebagainya.
- c. Lajnah, merupakan unit kegiatan yang bertugas menjalankan dan mengurus program NU menurut keperluan, seperti *Lajnah Ta'lif wa Nasyr*, Lajnah Falakiyah, dan lain sebagainya.

Untuk aspek pendidikan K.H. Hasyim Asy'ari pada awalnya lebih banyak mengadopsi pendidikan Islam klasik, yaitu sistem pendidikan yang lebih mengutamakan aspek normatif dimana tradisi belajar mengajar dan etika belajar yang dipedomani telah membawa umat Islam pada masa keemasan. Kemudian pada era

Abdurrahman Wahid (Gusdur), pendidikan dalam organisasi NU lebih mengutamakan pelajaran yang bersifat substantif. Dalam pendidikan itu terdapat nilai toleransi yang diinternalisasikan, pendidikan yang berdasar pada budaya lokal serta pendidikan Islam rahmatan lil alamin (Dawud Hasan, 2019).

Abdurrahman Wahid mendeskripsikan bahwa NU adalah pesantren yang tertulis besar dan pesantren itu adalah NU dengan tertulis kecil. Oleh karenanya, nilai yang dipedomani oleh pesantren adalah nilai NU juga, begitu juga sebaliknya, nilai NU adalah nilai pesantren. Hal ini juga sekaligus menunjukkan besarnya peranan kyai baik di NU lebih-lebih di pondok pesantren dengan segala peran dalam kehidupan sosial keagamaan dan sosial budaya yang mengitarinya.

Namun demikian, hal yang tidak bisa dihindari adalah bahwa NU juga mempunyai orientasi politik, tetapi orientasi dan tujuan itu terakumulasi dengan tujuan keagamaan yang disampaikan melalui penyebaran keyakinan keagamaan dan pelestarian ajaran Islam yang diyakini dan dinamai oleh warga NU sebagai *aswaja (Ahlussunnah wal jamaah)*. Penegasan kembali ke Khittah yakni penempatan NU sebagai organisasi yang murni bergerak pada bidang sosial keagamaan dikukuhkan kembali pada tahun 1984 pada muktamar NU yang ke 26 di Situbondo. Gerakan kembali ke Khittah ini didasari oleh beberapa alasan, diantaranya adalah banyaknya pesantren yang ditinggalkan oleh para santrinya karena keterlibatan kyainya dalam dunia politik. Di sisi yang lain adalah terdapatnya banyak pesantren yang harus merubah tradisi pendidikannya menjadi madrasah. Dalam bidang pendidikan NU mengalami ketertinggalan yang jauh secara kualitas dan kuantitas dibandingkan dengan pendidikan kelompok organisasi yang lain. Padahal sesungguhnya pendidikan menjadi gerakan prioritas dalam NU yang sejak awal berdirinya digeluti oleh para kyai pemimpin pondok pesantren. Belakangan ini NU sudah menyadari persoalan itu. Kesadaran ini menandai adanya perkembangan yang sangat penting dalam kehidupan NU yang tidak bisa lepas dari lahirnya generasi muda di lingkungan keluarga pondok pesantren dengan menikmati pendidikan tinggi. Mereka berikhtiar agar bisa mengembalikan NU kepada cita idealnya yakni sebagai organisasi sosial keagamaan (Abdurrahman, 2017).

4. Konstruksi Sosial dan Ideologi

Konstruksi sosial adalah sebuah pandangan yang mengajarkan bahwa semua nilai dan ideologi serta institusi sosial merupakan produk manusia. Pernyataan ini diperlukan waktu yang cukup dalam untuk memahami dan menghargai implikasi. Sebagai contoh, dimana dimasa lampau telah dianggap bahwa bumi adalah pusat jagat raya yang dikelilingi planet-planet. Galileo berpendapat lain bahwa menempatkan matahari itu sebagai pusat jagat raya dan bumi serta planet planet lain berevolusi mengelilingi matahari. Pandangan yang dianut secara umum ini dianggap bertentangan sehingga karenanya ia dianggap gila dan malah dimasukkan ke dalam penjara. Hal ini diperlukan waktu yang cukup panjang sebelum sistem heliosentris diterima oleh umum.

Konstruksi sosial merupakan sebuah pernyataan keyakinan (a claim) juga sebuah sudut pandang (a viewpoint) bahwa terdapat kandungan kesadaran, dari sesuatu yang diajarkan oleh kebudayaan dan masyarakat dan juga cara untuk berhubungan dengan orang lain. Dalam pandangan ini tercakup bahwa semua kuantitas metafisik riil dan abstrak yang telah dianggap sebagai suatu kepastian, hal ini dapat dipelajari dari orang lain disekitar kita. (Ian Rory, 1997).

Pada abad 20 pendekatan konstruksi sosial ini berkembang pesat yaitu pada tahun 1970an, karena pada waktu itu banyak dipengaruhi oleh ide-ide Foucault, yang kemudian disebut konstruksionisme sosial, sosiokonstruksionisme, atau non-esensialisme. Pendekatan konstruksi sosial telah lahir dari beberapa sumber, seperti interaksionisme sosial, antropologi simbolik, dan para ilmuwan bidang gay lesbian dan feminis. Dalam memberikan suatu kerangka bagi pengalaman dan pemaknaan seksualitas pendekatan ini lebih menekankan pada pengaruh budaya. Dengan demikian, konstruksi sosial secara tegas menyertakan bahwa budaya sebagai faktor kunci untuk memahami seksualitas. Dalam kondisi sosial historis yang konkrit akan terbentuk pemahaman individu tentang dunia, juga pengetahuan diri individu. Karena pengetahuan dan realitas yang konkrit dihubungkan oleh apa yang disebut Foucault sebagai discourse atau diskursus, yakni sejumlah argumen dan gagasan yang langsung berhubungan dengan teknik-teknik kontrol demi kekuasaan (power). Hal ini dapat

digambarkan bahwa konstruksi sosial dapat mempengaruhi perilaku dan orientasi sosial (Ngangi, 2011).

Berkaitan dengan Ideologi, kekuasaan, politik, ideologi, dan pendidikan merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan. Para tokoh, terutama pada pedagogi kritis sedari awal sudah menyadari hal ini sebagaimana terdapat dalam kajian mereka, seperti Michael Apple yang menegaskan kaitan antara ideologi dengan kurikulum, bahwa ideologi mampu mempengaruhi praktik reproduksi ekonomi serta sosial di lembaga-lembaga pendidikan, salah satunya melalui apa yang disebut sebagai hidden curriculum. Dengan kata lain, internalisasi nilai ideologi tertentu melalui kurikulum tentang nilai-nilai, tradisi bahkan memungkinkan sampai pada sikap politik, diwariskan agar dipelajari dan difahami oleh siswa di sekolah. Aronowitz dan Giroux (1987) menyampaikan dengan mengambil konteks di Amerika Serikat tentang adanya tendensi ideologi liberal, konservatif, dan radikal yang berlaku dalam praktik pendidikan di Amerika. Mereka bahkan menemukan bahwa ada ideologi neokonservatisme yang mempengaruhi krisis orientasi di PT (Perguruan Tinggi) di A.S. Dalam konteks pendidikan di Indonesia, H.A.R. Tilaar (2009) memberikan gambarannya bahwa kekuatan global dan dinamika politik nasional pasca reformasi 1998 seperti otonomi daerah dan desentralisasi, juga memengaruhi arah pendidikan nasional di Indonesia, bukan hanya pada ekonomi, militer, dan politik, tetapi juga ideologi dan budaya (Subkhan, 2018).

F. Metodologi Penelitian

Penelitian ini berangkat dari paradigma konstruktivistik. Konstruktivistik merupakan antitesis dari paradigma yang menjadikan observasi dan pengamatan objektif sebagai alat utama untuk menghasilkan suatu ilmu pengetahuan. Sebagaimana paradigma konstruktivistik, penelitian ini memiliki tujuan utama yaitu berusaha menafsirkan makna-makna yang dimiliki subjek penelitian (Creswell, 2017).

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis fenomenologi. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat interpretatif di mana peneliti diharuskan terlibat langsung dalam pengalaman secara terus menerus dan

berkelanjutan. Peneliti di dalamnya berperan untuk mengidentifikasi bias-bias, nilai-nilai, ataupun lingkungan sosial dan budaya yang dapat mempengaruhi peneliti dalam memberikan interpretasi data selama penelitian (Creswell, 2017). Sedangkan fenomena berarti memperlihatkan atau memunculkan sesuatu di balik yang tampak atau mengejala (Moustakas, 2004). Karenanya, penelitian dengan jenis fenomenologi ini digunakan untuk melihat fenomena yang nampak dan hakikat di balik realitas objektif tersebut.

Peneliti menggunakan jenis fenomenologi dengan tujuan agar dapat memahami berbagai fenomena yang dialami oleh siswa kelompok minoritas Ahmadiyah sebagai subjek penelitian, seperti tindakan, motivasi, secara holistik melalui penjelasan deskriptif dalam bentuk kata-kata dan juga bahasa, pada konteks khusus yang alamiah dengan cara memanfaatkan berbagai metode alamiah. Creswell (2018) menyebut bahwa studi fenomenologis mendeskripsikan pemaknaan umum dari sejumlah individu terhadap berbagai pengalaman hidup mereka terkait dengan konsep dan fenomena.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di beberapa sekolah di Lombok yang terdapat siswa minoritas Ahmadiyah. Selain itu penelitian juga dilakukan di beberapa sekolah di Madura yang menjadi basis mayoritas Nahdhiyah. Sekolah-sekolah tersebut akan menjadi lokasi penelitian untuk mendapatkan data-data primer dan juga data sekunder tentang pembelajaran Pendidikan Agama Islam baik pada siswa minoritas Ahmadiyah dan siswa mayoritas Nahdhiyah.

3. Sumber Data

Sumber data utama penelitian ini adalah para siswa minoritas Ahmadiyah yang berjumlah 11 orang dan juga para siswa mayoritas Annahdhiyah yang berjumlah 18 orang. Sedangkan sumber data sekundernya ialah para guru di sekolah-sekolah tersebut dan para orang tua siswa. Sumber data lain juga berasal dari kajian kepustakaan, media cetak dan media elektronik, yang dapat memenuhi dan memperkaya data hasil penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Peneliti melakukan wawancara dengan sumber data utama yaitu para siswa baik dari An-Nahdhiyah maupun dari Ahmadiyah. Data-data dari fenomena sosial pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada siswa Ahmadiyah yang diteliti dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam atau (*in-dept interview*) dan dokumentasi.

5. Analisis Data

Secara garis besar ada tahapan-tahapan analisis data fenomenologi sebagaimana yang dikemukakan oleh Moustakas (1994) yaitu sebagai berikut: 1) Mendeskripsikan secara tertulis semua fenomena yang dialami oleh subjek penelitian dalam kehidupan sehari-hari; 2) Mencatat atau menginventarisasi semua pernyataan atau jawaban dari subjek penelitian yang dianggap penting dan sesuai dengan topic penelitian; 3) Membuat klasifikasi dari semua pernyataan ke dalam tema-tema dan menentukan dan memilah antara pengalaman dan pemaknaan dari fenomena subjek penelitian; dan 4) Membangun dan membuat deskripsi yang bersifat menyeluruh tentang esensi dan makna dari pengalaman subjek penelitian.

Smith, Flowers dan Larkin, (2009), memperjelas langkah-langkah tersebut melalui tahapan sebagai berikut: 1) membaca secara berulang-ulang (*reading and re-reading*); 2) pencatatan awal (*initial noting*); 3) mengembangkan tema (*developing emergent themes*); 4) mencari hubungan antartema (*searching for connections across emergent themes*); 5) berpindah ke kasus lainnya (*moving the next cases*); dan 6) mencari pola yang sama antar kasus (*looking for patterns across cases*).

6. Keabsahan Data

Kredibilitas atau keabsahan data dalam penelitian ini, diperoleh peneliti dengan menggunakan tehnik-tehnik yaitu: perpanjangan keikut-sertaan, ketekunan pengamatan dan triangulasi. Ketiga kriteria tersebut di atas digunakan oleh peneliti dalam menilai hasil penelitian yang telah melalui pengecekan data dari informasi dan interpretasi hasil penelitian. Peneliti juga menyelidiki materi yang diperlukan seperti data lapangan berupa catatan dari hasil observasi peneliti di lapangan. Catatan lapangan yang dimaksud adalah catatan mengenai pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada

siswa minoritas Ahmadiyah dan siswa mayoritas Nahdliyah, dokumentasi terkait pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada siswa minoritas Ahmadiyah di Lombok dan siswa mayoritas Nahdliyah di Madura, hasil rekaman, analisis data, hasil sintesis, dan catatan hasil proses pelaksanaan penelitian yang mencakup metodologi, strategi, dan usaha untuk keabsahan data.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan hasil penelitian ini terbagi ke dalam 5 bab, yang menguraikan pemaknaan subjek penelitian dalam hal ini minoritas Ahmadiyah dan mayoritas Nahdliyah di Lombok dan Madura terhadap pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Uraian laporan akan terdiri dari Bab I sampai Bab V.

1. Bab I, berisikan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kajian teori dan konsep yang relevan.
2. Bab II, paparan data dan temuan penelitian. Pada bab ini peneliti akan memaparkan hasil penelitian mengenai pemaknaan siswa minoritas Ahmadiyah di Lombok dan siswa mayoritas an-Nahdliyah di Madura. Data-data lapangan yang dihasilkan dari wawancara, observasi dan dokumentasi tersebut akan dikumpulkan dan dipilah berdasarkan metode yang telah ditentukan dalam metode penelitian.
3. Bab III, pembahasan yang berisikan analisis peneliti terhadap data-data lapangan tentang fokus penelitian. Peneliti akan melakukan analisis terhadap temuan lapangan mengenai pemaknaan siswa minoritas Ahmadiyah terhadap pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Pun demikian peneliti juga akan melakukan analisis terhadap data-data lapangan mengenai siswa mayoritas an-Nahdliyah di Madura.
4. Bab IV, merupakan kesimpulan dari permasalahan bab-bab sebelumnya dan sekaligus jawaban dari pertanyaan penelitian yang digariskan dalam rumusan masalah, sekaligus penutup.

BAB II
PEMAKNAAN SISWA AHMADIYAH TENTANG MERDEKA BELAJAR
DALAM PEMBELAJARAN AGAMA ISLAM

Ahmadiyah merupakan kelompok minoritas di Lombok khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Kelompok Ahmadiyah yang ada di Lombok khususnya adalah kelompok Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI). Di Indonesia, kelompok ini berpusat di Bogor Jawa Barat. Kelompok JAI adalah pengikut Qadian, yang berkeyakinan bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah seorang nabi.

Kelompok Ahmadiyah, dalam catatan sejarah, termasuk kelompok yang paling sering mendapatkan persekusi. Sampai hari ini bahkan, persoalan yang menyangkut kelompok ini belumlah tuntas. Hak-hak sipilnya, bertempat tinggal, bersekolah dan juga bekerja tidak tidak kunjung terpenuhi. Stigma sebagai kelompok sesat mempengaruhi semua tindakan masyarakat pada semua aspek pada kelompok tersebut. Tindakan kelompok mayoritas, pada saat yang sama memberikan makna tersendiri terhadap kelompok ini dalam bertindak dan berperilaku sosial.

Data-data tentang pemaknaan siswa Ahmadiyah ini didapatkan melalui wawancara dan observasi dengan beberapa siswa Ahmadiyah yang bersekolah di sekolah-sekolah di Kota Mataram. Berdasarkan observasi dan wawancara, sekolah-sekolah umumnya di Mataram terbuka untuk semua. Tidak pernah ditemukan sekolah-sekolah yang menutup diri dan menghalangi kelompok-kelompok yang berbeda untuk bersekolah, termasuk kelompok Ahmadiyah. Juga hampir tidak pernah terjadi tindakan diskriminatif yang dilakukan oleh sekolah terhadap siswa yang berbeda baik dari suku, ras, agama dan golongan.

Bersekolah di tempat mayoritas menurut beberapa siswa Ahmadiyah didasari atas kehendak sendiri. Selain itu beberapa siswa menyampaikan bahwa mereka secara ekonomi tidak memiliki pilihan untuk bersekolah di tempat lain baik di sekolah milik pemerintah atau milik kelompok Ahmadiyah sendiri. Beberapa siswa yang lain menyampaikan bahwa mereka sangat ingin untuk bersekolah di sekolah milik

Ahmadiyah, tetapi karena keterbatasan ekonomi dan jauhnya akses, sehingga mereka tidak punya pilihan lain. Salah seorang siswa yaitu SA menyampaikan sebagai berikut:

“Dulu saya ingin mengikuti tetangga saya sekolah di Bogor, tetapi orang tua saya tidak mampu, akhirnya saya sekolah di sini. Mungkin besok setelah lulus SMP, saya bisa melanjutkan ke SMA Al-Wahid di Bogor.”

Sekalipun demikian, ketika sekolah, para siswa Ahmadiyah mengikuti semua proses di sekolah dengan baik. Menegenai keterbukaan sekolah dalam hal pemberian akses belajar, interaksi sosial, para siswa Ahmadiyah mengakui tidak ada masalah. Artinya sekolah telah menerapkan prinsip merdeka belajar.

NA juga menyampaikan keinginan yang sama dengan SA bahwa ia kelak setelah lulus memiliki cita-cita untuk melanjutkan sekolah di SMA Al-Wahid, agar ilmu agamanya semakin baik. Menurutnya hampir semua anak-anak Ahmadiyah di Transito memiliki keinginan untuk melanjutkan sekolah di SMA Al-Wahid, tetapi karena faktor ekonomi sehingga banyak yang melanjutkan di sekolah umum milik pemerintah.

“Mudahah-mudahan saya bisa lanjut sekolah di Al-Wahid nanti waktu SMA. Saya pingin mondok untuk belajar agama. Tapi kan biaya juga, kalau ada biaya ya pingin saya kesana (NA, 6 April 2023).

Menurut para siswa Ahmadiyah melanjutkan ke Al-Wahid adalah untuk belajar agama, dalam hal ini termasuk menjaga ajaran Ahmadiyah. Selain itu belajar di Al-Wahid tentu berbeda dengan belajar di sekolah umum karena Al-Wahid adalah sekolah milik Ahmadiyah. Belajar dalam komunitas sendiri pasti akan memberikan suasana yang lebih tenang dan nyaman.

Sekalipun demikian, para siswa mengakui bahwa setelah sekolah sekalipun di tempat mayoritas atau di sekolah umum, mereka akan mentaati aturan sekolah yang berlaku. Selain itu pula para siswa mengakui bahwa sekolah memperlakukan mereka dengan baik sama dengan yang lain.

Latar belakang siswa Ahmadiyah memilih bersekolah di sekolah umum dari petikan hasil wawancara di atas, salah satunya adalah ketiadaan akses untuk bersekolah di sekolah-sekolah milik Ahmadiyah. Lokasi yang jauh dan faktor ekonomi yang tidak

mendukung menjadi alasan beberapa siswa Ahmadiyah untuk memilih belajar di sekolah umum milik pemerintah atau sekolah negeri. Sekolah-sekolah umum negeri sendiri didominasi oleh para siswa dari Islam Mayoritas.

Pilihan di atas jelas memiliki konsekuensi bagi siswa Ahmadiyah terutama sekali dalam mengikuti pelajaran Pendidikan Agama Islam. Siswa Ahmadiyah dalam prosesnya dihadapkan pada penerimaan beberapa materi yang berbeda dari apa yang mereka pelajari di rumah. Siswa Ahmadiyah menyadari sepenuhnya bahwa beberapa perbedaan dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam itulah yang memicu konflik antara mereka dengan kalangan mayoritas.

Walaupun demikian, mengenai keterbukaan sekolah terhadap heterogenitas siswa ini diakui sendiri oleh para siswa Ahmadiyah sebagai kelompok minoritas. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh MD sebagai berikut:

“Selama bersekolah kami sama sekali tidak pernah mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan yang lain. Bahkan pihak sekolah tidak pernah menyinggung latar belakang kami sebagai pengikut Ahmadiyah. Memang pernah kami diejek, juga dihina karena tau kami adalah orang Ahmadiyah, tapi itu oleh siswa, bukan oleh guru.

Berdasarkan observasi selama penelitian berlangsung, peneliti memperhatikan sendiri bagaimana para siswa Ahmadiyah bergaul di sekolah baik dengan guru dan siswa yang lain. Peneliti tidak pernah melihat hal aneh dari cara bergaul mereka semisal menunjukkan rasa sungkan, takut dan malu.

Pihak sekolah pun membenarkan hal ini, misalnya kepala sekolah salah satu sekolah di Kota Mataram mengakui bahwa ia tidak hapal dan bahkan tidak tahu jika di sekolah yang dipimpinnya terdapat siswa dari pengikut Ahmadiyah. Ia menambahkan bahwa hal itu semata-mata karena dari awal para siswa tidak pernah dibedakan berdasarkan suku bangsa, agama dan aliran.

Beberapa guru yang mengetahui latar belakang siswa Ahmadiyah sekalipun tidak pernah menyinggung latar belakang tersebut di hadapan siswa yang lain. Sebagian besar dari warga sekolah baik guru dan siswa yang lain, tidak pernah memperdulikan identitas mereka sebagai pengikut Ahmadiyah. Walaupun memang

beberapa siswa yang lain pernah melakukan ujaran kebencian terhadap siswa Ahmadiyah, itu dilakukan di luar sekolah.

Perlakuan sekolah yang baik menurut para siswa Ahmadiyah membuat mereka tidak pernah merasa rendah diri atau berkecil hati dengan identitas mereka sebagai seorang Ahmadi. Menurutnya identitas mereka sebagai pengikut semakin tidak menghalangi mereka untuk berinteraksi dan bergaul dengan sesama siswa dan warga sekolah.

Selama melakukan observasi, peneliti melihat langsung interaksi sosial yang dilakukan oleh para siswa Ahmadiyah dengan warga sekolah baik guru dan juga siswa. Hal ini juga dibenarkan oleh para guru yang mengatakan bahwa siswa Ahmadiyah bergaul dengan akhlak yang baik di sekolah.

Ketika ditanyakan kepada para siswa Ahmadiyah mengenai perlakuan guru dan siswa di dalam kelas dan di luar kelas, Annisa salah seorang siswa Ahmadiyah mengungkapkan: “kami diperlakukan layaknya siswa yang lain. Tidak ada perlakuan yang berbeda, yang lebih atau kurang terhadap kami.

Berdasarkan observasi, sekolah-sekolah umum memberikan ruang bebas terhadap siswanya dalam melakukan interaksi sosial tanpa membedakan ras, suku dan agama. Siswa dari suku, ras dan agama yang berbeda bebas berteman dan bergaul dengan siapapun yang dikehendakinya di sekolah.

Keterbukaan sekolah dalam menerima dan memperlakukan siswa Ahmadiyah diakui sendiri oleh para siswa Ahmadiyah dan juga wali siswa. Para subjek penelitian menuturkan perlakuan terhadap mereka sama dengan siswa yang lain. Bahkan banyak guru dan juga warga sekolah hamper tidak mengetahui jika terdapat siswa Ahmadiyah sekolah. Sebagian guru yang mengetahui pun tidak pernah mempermasalahkan keberadaan Ahmadiyah.

Bagi siswa Ahmadiyah sendiri, interaksi sosial dengan orang lain, baik di sekolah maupun di rumah adalah hal yang harus dilakukan lebih-lebih jika yang dihadapi dalam bergaul tersebut bersikap baik kepada mereka. Hal ini mendasari sikap mereka untuk tidak memilih teman di sekolah.

Beberapa pendapat para siswa Ahmadiyah menunjukkan bahwa mereka memaknai interaksi sosial yang baik sebagai sesuatu yang harus dilakukan dengan siapa pun. Hal ini menurut mereka sebagai perintah orang tua dan juga ajaran Ahmadiyah.

Sikap baik para siswa Ahmadiyah juga dirasakan oleh peneliti pada saat menerima peneliti untuk melakukan wawancara. Hal yang sama juga sebagaimana diungkap para guru di sekolah di Kota Mataram bahwa semua siswa Ahmadiyah tidak pernah melakukan hal-hal yang dilarang semisal berkelahi dengan siswa lain.

AH misalnya memperkuat argumentasinya dengan menyatakan alasan bergaul dengan baik, di samping karena ajaran agama juga agar hidup aman dan damai. AH mengatakan:

“Sebagai orang Ahmadiyah, kami sadar bahwa kami hanya pengungsi, maka kami harus pandai membawa diri, apalagi kalau mereka juga baik kepada kami. Seandainya pun mereka menghina, tidak mungkin juga kan melawan. Kalau semakin dilawan, ya semakin juga mereka, ya kita mengalah saja. Orang tua kita juga begitu, diusir dari kampung, tapi mau gimana (AH, 10 April 2023).

Petikan wawancara di atas, menurut peneliti menunjukkan pemaknaan para siswa Ahmadiyah dalam interaksi sosial adalah memaknai interaksi sosial yang baik sebagai langkah adaptasi agar selamat dari konflik. Namun di sekolah sendiri AH mengakui bahwa sekolah telah memperlakukan mereka dengan adil.

Beberapa pendapat baik dari para siswa Ahmadiyah sendiri maupun pendapat dari guru dan siswa lain, membuktikan bahwa hubungan antara siswa dengan guru dan siswa yang lain sangat baik. Para siswa Ahmadiyah dengan identitasnya sendiri dapat berinteraksi dengan para guru dan para siswa yang lain tanpa memperlakukan keyakinan. Bagi para siswa Ahmadiyah keyakinan yang mereka anut justru menjadi alasan untuk selalu menjaga tindakan dan perbuatan pada kelompok lain.

Dari kutipan dan wawancara dengan para siswa Ahmadiyah sebagai subjek penelitian di atas, peneliti mendapatkan beberapa pemaknaan para siswa Ahmadiyah terhadap interaksi sosial adalah sebagai kepatuhan terhadap ajaran agama dan sebagai tuntutan sosial untuk menghindari konflik. Sedangkan terhadap materi pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang diungkap yaitu: menerima materi pembelajaran karena

memang itu adalah aturan guru dan sekolah, menerima dan mengikuti materi pembelajaran karena ingin mendapatkan nilai dan menghindari hukuman, dan menerima materi pembelajaran untuk menambah pengetahuan terhadap ajaran lain.

Hasil penelitian di atas, mengungkapkan pengalaman para siswa dalam interaksi sosial dengan siswa yang lain secara baik dan menerima materi pembelajaran dengan baik pula. Hal demikian diungkapkan sebagai bentuk kewajiban dan ketaatan pada orang tua dan ajaran Ahmadiyah. Sebagai subjek penelitian mengungkapkan bahwa tidak ada pilihan dalam memperlakukan orang lain selain membalas dengan kebaikan atau minimal tidak membalas sama sekali. Hal tersebut berdasarkan apa yang telah diingatkan oleh orang tua agar tidak membalas segala hinaan dengan hinaan pula. Selain itu sebagian subyek penelitian juga mengemukakan semboyan Ahmadiyah sebagai pedoman untuk melakukan interaksi sosial dengan baik.

Terkait pelaksanaan pembelajaran PAI khususnya di sekolah adalah amanat UUD 1945. Dalam sejarahnya, pelaksanaan pembelajaran PAI di sekolah telah mengalami pasang surut sedemikian rupa, sejak masa kolonial, pra kemerdekaan sampai pasca kemerdekaan hingga saat ini. Di semua jenjang pendidikan agama merupakan mata pelajaran yang wajib ditempuh oleh peserta didik, selain mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Kewarganegaraan.

Tanggung jawab pendidikan terutama Pendidikan Agama Islam tidak hanya terhenti pada sekolah atau sebaliknya. Pendidikan agama khususnya harus dilakukan melalui sinergitas dan kerjasama dari berbagai pihak termasuk sekolah dan keluarga. Keduanya mesti memiliki hubungan timbal balik yang diperlukan dan saling mendukung satu sama lain dalam proses pendidikan bagi anak atau peserta didik.

Hal yang perlu diingat dari beberapa pernyataan di atas, bahwa kerjasama tidak hanya sebatas pada proses pembelajaran, tapi juga menyangkut materi pembelajaran. Maka dalam hal ini antara sekolah dan keluarga Ahmadiyah jelas tidak memiliki titik temu, karena perbedaan keyakinan. Karena itu pula pembelajaran PAI bagi siswa menjadi sesuatu yang problematis.

Sehubungan dengan materi pembelajaran PAI ini, SR mengatakan bahwa siswa Ahmadiyah belajar PAI bersama dengan siswa yang lain tanpa perlakuan yang berbeda.

Dalam proses pembelajaran di kelas sekalipun, mereka dipandang sama dengan siswa yang lain. Guru PAI mengatakan bahwa pembelajaran PAI yang diajarkan di sekolah mengacu pada kurikulum pemerintah. Apa yang terdapat dalam kurikulum, maka itulah yang dilakukan oleh guru di sekolah.

Sementara siswa Ahmadiyah menyampaikan dalam pembelajaran PAI beberapa kali disuruh membaca Al-Qur'an dan juga ikut salat di Musala Sekolah. Menurutnya ikut salat di Musala Sekolah demi mentaati peraturan sekolah dan untuk mendapatkan nilai mata pelajaran PAI. Sedangkan kalau di rumah, ia akan ikut keluarganya dan tidak pernah salat di masjid yang dimiliki oleh mayoritas selain Ahmadiyah.

“Ya sebagai siswa kan kita harus taat, jadi penjelasan guru ya kita dengarkan, kalau misalnya ada yang beda, ya juga kita dengarkan, masak kita mau membantah, biarin aja, nggak berani juga kan kita. Soal percaya atau tidak itu nanti aja (AN, 09 April 2023).

MD salah seorang siswa Ahmadiyah juga menyampaikan hal yang hampir sama dengan mengatakan bahwa guru PAI tidak pernah menyinggung akan perbedaan keyakinan. Sehingga ia dapat belajar dengan baik dan bahkan mendapatkan nilai PAI yang memuaskan. Materi Pendidikan Agama Islam menurutnya sama dengan materi yang diajarkan di rumah, misalnya materi salat dan baca Al-Qur'an. Menurutnya, perbedaannya hanya pada keyakinan tentang Mirza Ghulam Ahmad yang diyakini sebagai Imam Mahdi. Sedangkan menurut mayoritas, Imam Mahdi belum lahir atau belum dibangkitkan ke Bumi. Adapun tentang Nabi Muhammad, Ahmadiyah mengakui bahwa Muhammad tetaplah seorang nabi sebagaimana keyakinan mayoritas, tetapi bukan sebagai penutup para nabi.

Pada materi lain yang berbeda dengan Ahmadiyah, menurutnya MD, ia mengiyakan saja penjelasan guru. Sebab menurutnya pula tidak tepat untuk menyangkal dalam situasi dan kondisi sebagai siswa lebih-lebih siswa minoritas. Baginya melawan baik dengan kata-kata maupun dengan fisik tidak akan berarti apa-apa.

AN memberikan jawaban ketika ditanya oleh peneliti tentang materi pembelajaran seputar Nabi Muhammad, bahwa apa yang diajarkan di sekolah dan di rumah sebagian besar memiliki kesamaan. Jika pun dijelaskan berbeda oleh guru di sekolah, menurutnya diiyakan saja, sebagai siswa di sekolah ia harus mematuhi penjelasan guru.

Ketika ditanya tentang salat di Musala Sekolah, ia pun menjawab bahwa ia ikut karena aturan yang mewajibkan dan sebagai siswa ia tidak boleh melanggar. Begitu lah yang diungkapkan oleh AN. Menurutnya kegiatan salat di Musala Sekolah setiap Zuhur selalu diikutinya bersama dengan para siswa yang lain.

Apa yang disampaikan oleh guru tentang Nabi Muhammad Saw. dan tentang Nabi Isa atau materi-materi yang lain, menurut mereka tidak lebih dari tambahan pengetahuan. Bahkan materi-materi pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang disampaikan menurut mereka tidak akan mengubah keyakinan bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah seorang nabi. Begitu juga dengan keyakinan bahwa Nabi Isa telah wafat, bukan diangkat ke langit.

Sebagaimana diketahui bahwa pokok perbedaan Islam Mayoritas dengan Ahmadiyah adalah pada beberapa ajaran pokok seperti yang telah diuraikan. Nah, fokus penelitian ini adalah mendalami respons atau tanggapan siswa Ahmadiyah manakala dihadapkan pada perbedaan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek penelitian maka peneliti menguraikan tanggapan para siswa Ahmadiyah sebagai berikut.

Subjek penelitian yaitu FJ menyampaikan bahwa apapun materi yang dijelaskan oleh guru PAI tentang Islam, ia terima. Jika bertentangan dengan keyakinan Ahmadiyah maka ia memilih apa yang disampaikan oleh orang tuanya. Apa yang disampaikan oleh guru tentang perbedaan adalah bagian dari pengetahuan. Karena bagaimanapun baginya jika ia menyangkal perkataan guru maka tidak ada gunanya. Karena itulah semua materi pembelajaran PAI yang disampaikan oleh guru ia percaya saja.

Terkait salat berjamaah, SA mengungkapkan bahwa ia selalu salat di rumah tidak pernah ke Masjid Al-Muhajirin di WT, sekalipun apalagi ke masjid sekitar milik

mayoritas. Ia tidak ke masjid karena tidak diberikan ijin oleh orang tua karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Di Musala Sekolah, S6 pun mengungkapkan bahwa ia beberapa kali ke Musala Sekolah. Jikapun ikut salat di Musala Sekolah, ia memilih untuk salat di saf depan karena bagi Ahmadiyah tidak boleh salat di belakang non-Ahmadi.

Beberapa ungkapan dari subjek penelitian di atas, memperjelas bahwa para siswa Ahmadiyah menerima materi pembelajaran dengan patuh, menjelaskan materi yang dijelaskan dengan baik walaupun berbeda dengan apa yang diyakininya. Baginya perbedaan adalah soal yang lain, kewajibannya hanyalah belajar dengan baik. Salah seorang siswa memilih untuk menyesuaikan antara ajaran yang diyakininya dengan apa yang diajarkan di sekolah dengan mengambil jalan tengah seperti yang dilakukan oleh SA dengan memilih saf depan ketika salat di Musala Sekolah.

SA mengutarakan hal berbeda manakala ia mengikuti salat di Musala Sekolah. Menurutnya memang harus mengikuti aturan guru dan sekolah. Namun menjaga keyakinan juga harus. Karenanya SA mengaku setiap kali salat di Musala Sekolah ia memilih saf terdepan. Karena bagaimanapun, menurutnya seorang Ahmadi tidak boleh salat di belakang non-Ahmadi. Memilih saf terdepan dianggap oleh SA sebagai cara yang paling tepat di sekolah.

Adapun terkait materi yang disampaikan guru di dalam kelas, menurut S4 sama dengan beberapa subjek penelitian sebelumnya, bahwa ia mesti mengiyakan dan menerima pendapat guru dan tidak layak untuk membantah karena pengetahuannya belum memadai.

Sedangkan terhadap materi pembelajaran, berdasarkan hasil wawancara dengan para siswa Ahmadiyah, peneliti mendapatkan informasi mengenai pengetahuan mereka terhadap ajaran Ahmadiyah. Artinya, walaupun usia mereka yang masih tergolong remaja, bahwa para siswa ini telah memiliki pengetahuan tentang ajaran yang diyakini oleh para orang tua mereka yaitu ajaran Ahmadiyah. Hal ini karena di keluarga, mereka juga belajar agama khususnya tentang *ke-jemaat-an*.

JN mengutarakan bahwa dalam setiap penjelasan guru tentang materi pembelajaran baik pada pokok ajaran yang sama dengan keyakinan Ahmadiyah atau

pada pokok ajaran yang berbeda akan diterimanya. Sebab pengetahuan menurutnya tidak terbatas pada apa yang diajarkan oleh orang tua mereka. Ajaran-ajaran pokok kelompok lain juga harus dipahami dan dimengerti sekalipun bukan untuk diyakini. Menurutya jika itu semata pengetahuan, maka tidak ada salahnya untuk dipelajari. Jadi menurut JN keberterimaannya terhadap berbagai materi yang disampaikan oleh guru adalah semata untuk pengetahuan. Meyakini dan menganut suatu paham adalah soal lain.

SA seakan sependapat dengan JN, SA mengatakan: “Ya belajar apa saja kan nggak apa-apa, mau pendapatnya begini atau itu ya gak masalah. Kan biar kita tahu juga orang lain bagaimana, kita bagaimana. Bedanya Ahmadiyah dengan yang lain apa, biar kita tahu (JN, 12 April 2023).

Secara umum berkaitan dengan pelajaran PAI yang menjadi pelajaran wajib di sekolah, ini siswa memberikan respon yang sama bahwa mereka sebenarnya telah mendapatkan pelajaran tersebut sejak sekolah dasar baik kelas 1 hingga kelas 6. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Abdullah *”kami kan dulu sekolah di SD dan SMP, dari dulu kami sudah belajar PAI, jadi gak ada masalah.*

Adapun ketika ditanya tentang pemaknaan mereka terhadap merdeka dalam belajar dalam lingkungan mayoritas khususnya dalam pembelajaran PAI. Dalam konteks ini mereka memberikan pandangannya bahwa mereka menyukai pelajaran PAI secara umum, karena memang ajaran mayoritas dan Ahmadiyah lebih banyak kesamaannya. Abdullah menyatakan:

“Pastinya saya senang belajar pelajaran PAI, karena itu kan pelajaran yang harus kiat pelajari untuk agama kita, di rumah kami juga belajar PAI, saya senang makanya nilai saya juga bagus di pelajaran PAI, pelajarannya mudah dipahami dan dimengerti oleh kami. Sama dengan yang kami pelajari di rumah, mungkin hanya beberapa saja yang berbeda.”

Dari beberapa wawancara dengan subjek penelitian, ditemukan pengakuan terhadap materi Pendidikan Agama Islam yang menurut mereka tidak sesuai dengan keyakinan Ahmadiyah. Perbedaan tersebut ada pada beberapa hal, dan selebihnya adalah sama. Pada beberapa perbedaan tersebut para subjek penelitian memilih untuk pasif, walaupun pada dasarnya mereka tidak menerima. Tetapi karena mereka

mengakui tidak memiliki kapasitas untuk menyanggah, maka mereka memilih beadaptasi. Sedangkan dalam hal interaksi dan keterbukaan sekolah, mereka mengakui bahwa sekolah tidak pernah berlaku diskriminatif dan memberikan kebebasan yang sama dengan siswa yang lain. Pada beberapa materi yang sama mereka dengan suka rela dan senang mengikuti pembelajaran. Adapun pada materi yang berbeda mereka menyikapi dengan bijaksana dengan mengikuti pelajaran tersebut di sekolah saja. Adapun saat kembali ke rumah, maka mereka kembali pada keyakinan dan ajaran Ahmadiyah.

SA mengatakan bahwa keyakinannya sebagai Ahmadiyah tidak mungkin ia tampakkan di hadapan siswa dan guru. Perbedaan pendapat dengan guru dan materi pelajaran yang disampaikan tidak mungkin disanggahnya. Ia lebih baik mengikuti dan mendengarkan materi tersebut. Dengan kata lain materi pelajaran PAI di sekolah harus diterimanya secara mutlak, sesuai atau tidak sesuai dengan keyakinan sekalipun. Menurutny walaupun guru tidak secara langsung memaksanya untuk menerima pelajaran PAI.

Apa yang dilakukan oleh siswa Ahmadiyah membuktikan bahwa kelompok primer lebih dominan dalam membentuk konsep diri seseorang. Cooley (1929) membagi kelompok menjadi primer dan skunder. Kelompok primer adalah orang tua, sedangkan kelompok skunder adalah lingkungan di luarnya seperti sekolah. Dalam kasus Ahmadiyah, sikap mereka dalam pembelajaran PAI menunjukkan dominasi kelompok primer atas kelompok skunder.

Konsep diri subjektif siswa Ahmadiyah yang sudah terbentuk dari kelompok primer yaitu keluarga tidak mudah digoyahkan oleh tekanan kelompok skunder berupa sekolah. Bagi siswa Ahmadiyah pandangan kelompok mayoritas terhadap mereka adalah cermin diri atau *looking glass self*. Selanjutnya pemaknaan mereka terhadap pandangan mayoritas tersebut mengilhami tindakan-tindakan para siswa Ahmadiyah di sekolah terutama dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam.

Seperti yang dijelaskan oleh beberapa siswa Ahmadiyah, kesadaran akan latar belakang sebagai seorang Ahmadi membentuk perilaku dan sikap mereka untuk tetap berhati-hati dan menjaga diri di sekolah. Para siswa Ahmadiyah cenderung lebih

berhati-hati baik dalam berucap atau berperilaku di sekolah. Ketika menerima pelajaran yang berbeda di kelas misalnya, mereka lebih memilih diam dan mengikuti.

Kehati-kehatian siswa Ahmadiyah tersebut di atas tentu adalah bukti ketidakbebasan mereka dalam berekspresi di sekolah. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip merdeka belajar yang menghendaki kebebasan berpikir bagi siswa. Walaupun mungkin dalam pembelajaran, guru tidak secara langsung melakukan intimidasi terhadap siswa Ahmadiyah.

Sikap yang dilakukan oleh siswa Ahmadiyah dalam pembelajaran lebih didasarkan pada kesadaran subjektif tentang siapa mereka. Kesadaran akan keberadaan diri sebagai kelompok minoritas memaksa untuk lebih bersikap mengalah dan menyesuaikan diri dengan lingkungan.

Merdeka belajar sendiri menuntut para siswa untuk merdeka berpikir, merdeka berinovasi dan merdeka mandiri dan kreatif. Merdeka belajar berangkat dari filsafat humanisme dan konstruktivisme yang menekankan kebebasan kepada individu untuk mengembangkan potensi diri agar berfungsi dan bermakna bagi lingkungannya. Bagi konstruktivisme, hakikat dasar pendidikan adalah mengembangkan jiwa peserta didik yang merdeka. Kemerdekaan berkaitan dengan pola pikir, perasaan dan kemauan mulia.

Sikap kehati-hatian para siswa Ahmadiyah dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam khususnya menunjukkan pemanaan subjektif mereka terhadap merdeka makna berpikir. Merdeka berpikir tidak lantas memberikan ruang untuk bebas menyampaikan pendapat tentang keyakinan-keyakinan di ruang publik. Interpretasi ini juga sebenarnya dilatarbelakangi oleh berbagai bentuk penolakan sebelumnya terhadap mereka. Dengan kata lain, kebebasan berpikir tidak lantas berarti kebebasan berpendapat. Nyatanya kebebasan beragama dan berkeyakinan sebagai buah dari kebebasan berpikir tidak dapat memberikan tempat bagi Ahmadiyah di ruang publik.

Namun menariknya, di saat yang bersamaan, ketika kemerdekaan berpendapat tidak didapatkan, siswa Ahmadiyah justru dapat berinovasi dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Pada pelaksanaan salat misalnya, siswa Ahmadiyah berlaku adaptif dengan salat di barisan terdepan. Mengambil saf atau barisan terdepan ketika

salat berjamaah menurut siswa Ahmadiyah merupakan jalan tengah, ketika mereka tidak mungkin untuk salat berjamaah sendiri. Menurut kepercayaan Ahmadiyah sendiri, salat di belakang non-Ahmadiyah adalah dilarang.

Tindakan inovatif yang dilakukan oleh siswa Ahmadiyah ini menunjukkan bahwa mereka berhasil melakukan tindakan yang merdeka walaupun di bawah tekanan. Tindakan inovatif ini lahir dari interpretasi subjektif terhadap realitas di luar dirinya. Tindakan ini lahir dari pemaknaan siswa Ahmadiyah terhadap simbol-simbol yang diekspresikan oleh kelompok mayoritas. Simbol-simbol tersebut dimaknai sebagai sebuah penentangan terhadap eksistensi Ahmadiyah.

Hal ini juga berarti bahwa siswa Ahmadiyah dalam tindakannya, selain merepresentasikan kehendak, pemikiran dan pola yang diinginkan oleh ideologi organisasinya, organisasi yang senantiasa diinternalisasi sejak mereka kecil, juga telah mencoba memerdekakan diri dari doktrin sekolah. Dalam artian bahwa siswa Ahmadiyah berada di antara doktrin keluarga dan sekolah, antara minoritas Ahmadiyah dan mayoritas Islam. Pada satu sisi yang lain, siswa Ahmadiyah diharuskan oleh lembaga untuk mengikuti dan mempelajari ideologi mayoritas dan di sisi yang lain mereka dituntut untuk mempertahankan ajaran kelompok mereka.

Tindakan para siswa Ahmadiyah dengan mengambil jalan tengah seperti yang dijelaskan di atas dapat disebut sebagai tindakan inovatif. Selain tetap dapat mengakomodir ajaran kelompok Ahmadiyah sendiri juga tetap mengikuti aturan-aturan sekolah yang berdasar pada ajaran mayoritas.

Adapun dalam konteks kebebasan mengemukakan pendapat dan pemikirannya. Sekolah secara langsung memang tidak melarang kelompok agama yang berbeda dalam Islam untuk bersekolah ataupun menunjukkan keyakinannya di hadapan sekolah.

Terdapat persoalan mendasar dalam kasus siswa Ahmadiyah ini yang berimplikasi pada semua persoalan dalam berbagai aspek termasuk pendidikan. Persoalan dasar tersebut adalah pengakuan kelompok mayoritas dan Negara terhadap eksistensi mereka. Selama itu tidak dapat diselesaikan, maka segala hak yang berhubungan dengan keyakinannya tidak akan pernah selesai.

Jika seorang siswa Ahmadiyah tidak mengikuti ajaran mayoritas atau materi pelajaran yang sudah ditentukan oleh sekolah dengan alasan bahwa ia adalah seorang Ahmadiyah, pasti akan dipandang bukan sebagai orang Islam, atau ia adalah Islam yang sesat. Fakta ini sangatlah diskriminatif, khususnya bagi kelompok yang tidak diakui oleh kelompok mayoritas, bahkan oleh Negara.

Kondisi ini menjadi semacam PR yang harus diselesaikan oleh Negara. Sampai kapan kelompok Ahmadiyah harus “dipaksa” melebur dan mengikuti kehendak kelompok mayoritas. Diskriminasi ini tidak hanya menyangkut persoalan agama, tetapi juga berimbas pada pemenuhan hak-hak sosial dan ekonomi pengikut Ahmadiyah. Ahmadiyah dalam berbagai aspek telah “dihukum” karena keyakinannya. Hukuman yang diterima bukan saja telah meniadakan kebebasan memilih tempat tinggal, namun mengancam hak hidupnya.

Erni Budiwanti (2022) membagi dua kategori minoritas di Indonesia berdasarkan hubungan dengan mayoritas, yaitu minoritas yang memiliki posisi kurang menguntungkan (*disadvantage position*), dan minoritas yang relatif mempunyai posisi yang menguntungkan (*advantage position*). Ahmadiyah dalam hal ini termasuk ke dalam minoritas yang posisinya kurang menguntungkan (*disadvantage position*).

Alasan mengapa para siswa Ahmadiyah harus menyembunyikan identitas mereka, karena tidak ada jaminan keamanan dan kebebasan dari sekolah. Padahal semestinya sekolah sebagai ruang publik harus dapat diakses dan dimanfaatkan oleh setiap orang dan kelompok. Ruang publik, lebih-lebih sekolah, idealnya difungsikan di atas landasan prinsip kebebasan yang setara bagi siapa saja dan kelompok mana saja yang memanfaatkannya tanpa ancaman dan tekanan (Budiwanti, 2022).

Potensi ancaman inilah yang menghantui siswa Ahmadiyah. Trauma akibat konflik yang mendalam, dan tidak adanya jaminan keamanan di masa yang akan datang membuat para siswa Ahmadiyah takut dan berhati-hati dalam bertindak. Bagaimanapun pluralitas aliran keagamaan ini dalam sejarahnya telah mengundang konflik yang berkepanjangan melebihi konflik yang diakibatkan oleh perbedaan agama.

Bersekolah di sekolah umum hanya menjadi alternatif bagi para siswa Ahmadiyah. Para siswa Ahmadiyah sebenarnya ingin melanjutkan pendidikan di sekolah-sekolah milik Ahmadiyah. Seperti yang disampaikan oleh siswa Ahmadiyah SA berikut: “Saya ingin sekali bersekolah di SMP Al-Wahid di Bogor, tetapi karena biaya saya tidak bisa. Mudah-mudahan suatu saat saya bisa melanjutkan kesana.”(SA, 20 April 2023).

Walaupun berlatar belakang dari keterpaksaan, tetapi secara teoritis mereka tetap mengakui bahwa Pendidikan Agama Islam di sekolah mengajarkan tentang keterbukaan berpikir. Guru misalnya memberikan ruang untuk mengemukakan pendapat terhadap materi yang diberikan. Sekolah secara umum mengedepankan toleransi dalam perbedaan pemahaman, perbedaan organisasi dan perbedaan pandangan di antara warganya.

Hal tersebut di atas karena pembelajaran PAI di sekolah umum mengajarkan tentang inklusivisme dan tentang perbedaan madzhab di mana hal ini diwujudkan dengan adanya perbedaan-perbedaan pemahaman dalam praktek-praktek keagamaan semisal perbedaan mulai puasa pada Bulan Ramadhan dan juga perbedaan pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri. Keterbukaan berpikir siswa menghadapi siswa-siswa lain dalam organisasi selain mayoritas juga nampak dari interaksi sosial dan pergaulan sehari-hari.

Walaupun demikian, dalam pandangan siswa Ahmadiyah keterbukaan berpikir yang diberikan tersebut masih terbatas kepada minoritas yang diakui semisal Muhammadiyah dan kelompok lain. Kesadaran siswa Ahmadiyah sebagai bagian dari kelompok yang tidak diakui menjadikan mereka memiliki pemaknaan yang tidak sama dengan kelompok lain. Bagi siswa Ahmadiyah praktik kebebasan yang diberikan adalah kebebasan semua.

Hal tersebut di atas semakin memperkuat bahwa siswa Ahmadiyah baik yang merasa terpaksa atau tidak dipaksa sekalipun sesungguhnya dikendalikan oleh berbagai realitas sosial dalam lingkup yang lebih besar. Pengaruh ideologi, pengalaman-pengalaman subjektif di luar sekolah telah mempengaruhi pemaknaan mereka terhadap pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Sebagai seorang anak, di dalam keluarganya, mereka tidak bebas menentukan ideologi selain Ahmadiyah. Sedangkan sebagai seorang

siswa, di lingkungan sekolah, mereka tidak bebas mengekspresikan diri sebagai seorang pengikut Ahmadiyah. Kemerdekaan mereka dalam belajar belum sepenuhnya didapatkannya.

Bagi siswa Ahmadiyah, sekolah hanyalah pentas drama seperti yang diungkapkan oleh Erving Goffman (1982). Baginya mayoritas hanya menerima bagian dari pentas depan (*front stage*) yang hanya merupakan definisi dari kenyataan, tanpa perlu memahami sifat kenyataan itu sendiri dengan apa yang terjadi di pentas belakang (*back stage*). Bagi siswa Ahmadiyah sekolah tidak lebih dari panggung sandiwara.

Tindakan-tindakan tersebut, menggunakan cara pandang Mead (1934) bahwa sebagai individu para siswa minoritas akan bertindak atas dasar pemaknaannya terhadap simbol-simbol yang dipelajari dan didapatkan dari interaksi sosialnya dengan lingkungan belajar. Pandangan subjektif dari dirinya sendiri dan pandangan objektif dunia eksternal dalam hal ini mayoritas, akan membentuk konsep diri dan tindakannya untuk bertindak adaptif.

BAB III

PEMAKNAAN SISWA ANNAHDIYAH TENTANG MERDEKA BELAJAR DALAM PEMBELAJARAN AGAMA ISLAM

Pelajaran Agama Islam dalam kurikulum semua lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan LP Ma'arif NU terdiri dari pendidikan agama Islam dan aswaja. Pelajaran Pendidikan agama Islam tersebut meliputi fiqh, Hadits, Akidah, Akhlak dan sejarah peradaban Islam. Pelajaran ini memperdalam pemahaman keagamaan siswa secara umum tentang ajaran Islam, khususnya Islam yang dipahami oleh ulama' dan masyarakat Indonesia yang mayoritas berhaluan ahlussunah wal jama'ah. Internalisasi faham keagamaan melalui kurikulum pendidikan ini diperkuat oleh pelajaran Aswaja, pelajaran muatan lokal yang bersifat wajib untuk disampaikan dalam semua kurikulum lembaga pendidikan di bawah LP Ma'arif NU.

Berbicara mengenai pemaknaan siswa tentang pembelajaran Pendidikan Agama Islam, khususnya pendidikan aswaja ke-NU-an sebagai muatan lokal yang bersifat wajib dalam kurikulum lembaga pendidikan organisasi NU, sama artinya dengan membicarakan mereka dalam konteks ideo-sosiologisnya, tentang konstruksi sosiologis dan ideologis hingga melahirkan interpretasi subjektif di satu sisi dan di sisi yang lain tentang kemerdekaan mereka dalam belajar dan berpikirnya.

Berdasarkan pada hasil wawancara kepada siswa-siswa jenjang SMA di beberapa sekolah yang berada di bawah naungan NU di Madura yakni SMA NU Sumenep, SMA Wahid Hasyim Pamekasan, SMA Ma'arif 1 Pamekasan, SMA Ma'arif 2 Pamekasan dan SMA al-Mas'udiyah Sreseh Sampang, menunjukkan bahwa pembelajaran Agama Islam yang ada di lingkungan mereka meliputi pendidikan agama dan aswaja. Hal ini dibenarkan oleh Syakila Qurratul Uyun, siswa SMA Ma'arif 1 Pamekasan. Ia menyatakan bahwa Pendidikan Agama Islam yang ada di sekolahnya adalah pendidikan agama dan aswaja; "Pelajaran PAI di sekolah ini ada Agama dan Aswaja pak." Hal yang sama disampaikan oleh siswa-siswa yang lain, termasuk Anggun Asrianti dari sekolah yang sama, ia menyampaikan bahwa pembelajaran Pendidikan Agama Islam secara garis besar meliputi dua pelajaran tersebut.

Mengenai rincian pendidikan agama yang dimaksud mereka menyatakan bahwa pendidikan agama tersebut meliputi fiqh, Hadits, Akidah Akhlak. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Aini siswa Kelas X/IPA yang berhasil diwawancarai di Ruang Kelas. Ia menegaskan: “Pelajaran PAI di sekolah ini adalah PAI pak, PAI ini terdiri dari Fiqh, Hadits, Akidah Akhlak dan yang paling menonjol dalam pelajaran keagamaan adalah Aswaja.”

Begitu pula Aini siswa Kelas X/IPA yang menegaskan hal tersebut; “Pelajaran PAI di sekolah ini adalah PAI yaitu Fiqh, Hadits, Akidah, Akhlak dan Aswaja.” Yudianto juga menyatakan hal yang sama: “Pelajaran PAI di sekolah ini adalah PAI, Fiqh, Hadits, Akidah, Akhlak dan Aswaja.” Pelajaran yang sama juga disampaikan di SMA Wachid Hasyim dengan kandungan pelajaran yang sama dengan apa yang diajarkan di SMA ma’arif. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Muhammad Irfan Syauqi dari SMA Wahid Hasyim; “Pelajaran PAI di sekolah ini PAI macam-macamnya Hadits, Akidah, Fiqh dan Adab, dan Aswaja juga.”

Pemaparan ini memastikan bahwa pelajaran aswaja merupakan bagian Pembelajaran Agama Islam yang pasti diberikan pada semua lembaga pendidikan di bawah naungan NU. Kepastian ini ditegaskan pula oleh siswa SMA NU Sumenep dan al-Mas’udiyah Sreseh sampang. Dalam kurikulum lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan NU, aswaja menjadi pelajaran penting, sekalipun statusnya sebagai muatan lokal. Bahkan bapak Abusiri sebagai pengampu pelajaran aswaja di SMA Ma’arif 1 Pamekasan menyampaikan bahwa Aswaja menjadi pelajaran Wajib yang harus dipelajari oleh siswa: “Aswaja memang hanya muatan lokal, tapi di kami menjadi kurikulum wajib, yang harus dipelajari, ini penting bagi kami agar generasi NU memahami betul tentang prinsip, ajaran dan ideologi dalam NU.”

Berkaitan dengan status pelajaran aswaja yang menjadi pelajaran wajib ini siswa memberikan respon yang sama bahwa mereka sebenarnya telah mendapatkan pelajaran tersebut sejak bersekolah di Madrasah Tsanawiyah baik kelas 1 hingga kelas 3. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Khalil Yasin dari Sreseh Sampang; “Pelajaran aswaja itu memang menjadi keharusan di sekolah kami, bahkan kami dulu

juga dapat pelajaran aswaja waktu di Tsanawiyah, jadi dari kelas 1 MTs kami sudah diajari pelajaran aswaja.”

Berkaitan dengan pemaknaan mereka tentang merdeka dalam belajar dalam lingkungan organisasi NU sebagai organisasi kemasyarakatan mereka khususnya dalam pembelajaran aswaja. Dalam konteks ini Mereka memberikan pandangannya bahwa mereka menyukai pelajaran PAI, lebih-lebih pada pelajaran aswaja yang menjadi kehasan sekolah-sekolah NU. Anggun Asrianti menyatakan: “Saya sangat menyukai pelajaran PAI, Karena pelajarannya mudah dipahami dan dimengerti oleh kami selaku siswa, Sangat Baik, karena selain ada mapel aswaja disekolah ini juga sering mengadakan kajian tentang aswaja itu dengan mendatangkan pemateri dari luar yang memang di bidangnya.”

Hal yang sama disampaikan oleh Ismail Akbar, siswa SMA Ma’arif 3 Pamekasan: “Saya sangat menyukai pelajaran PAI, Karena di pelajaran PAI saya bisa mempelajari tentang agama lebih dalam, Pandangan saya tentang pelajaran PAI sangat bagus dan kejelasan materi yang diampaikan cukup baik, sedangkan aswaja sangat penting, baik untuk dipelajari, karena aswaja mempelajari tentang sunnah ”.

Lebih dari itu, Fadil Syameel Rabbani, siswa SMA Wachid Hasyim Pamekasan menegaskan;

“Pelajaran PAI di sekolah ada fikih, aqidah akhlak, al-qur’an hadits, sirah, kitab kuning, Dan Saya sangat menyukai pelajaran PAI, Karena dengan mempelajari PAI saya bisa mengetahui tentang zakat, sedekah dan ilmu keagamaan lainnya, Pandangan saya tentang pelajaran PAI sangat baik, karena sekolah ini merupakan sekolah di bawah naungan NU, sehingga pelajaran PAI di sini sangat diutamakan, terutama tentang pelajaran Aswaja ke NU-an secara khusus, karena di pelajaran aswaja saya juga bisa mempelajari lebih dalam lagi tentang sunnah rasul.”

Hal yang sama juga disampaikan oleh Siti Subaidah, siswi SMA Ma’arif 1 Pamekasan;

“Pelajaran PAI di sekolah ini ada Agama dan Awaja, Saya menyukai pelajaran PAI, karena dengan pelajaran PAI saya bisa lebih memahami tentang keagamaan dan bisa menambah keimanan saya, bagi saya di pelajaran aswaja sangat dibutuhkan, karena diajari tentang NU dan sejarah aswaja serta sunnah-sunnah Rasul.”

Ilzar, siswa SMA NU Sumenep menegaskan bahwa pelajaran Pendidikan Agama Islam dengan aswaja menjadikannya senang mempelajari pelajaran ini karena gurunya menyenangkan dan isinya yang moderat, sehingga secara psikologis mereka sama-sama menyukai terhadap pelajaran keagamaan tersebut: “Di sekolah saya ada Bahasa arab dan aswaja, saya menyukai pelajaran ini karena mempelajari tata cara hidup yang sesuai Islam, Bagusnya lagi karena gurunya menyenangkan dan baik, teman-teman termasuk saya menyukai aswaja karena pelajaran aswaja sangat moderat.”

Lain halnya dengan Lailatul Qomariyah, siswa kelas XI IPA SMA Ma’arif 1 Pamekasan yang menyatakan bahwa dia tidak terlalu suka pada pelajaran PAI secara umum tetapi menyukai aswaja secara khusus:

“Pelajaran PAI di sekolah ini ada Agama dan Awaja, Saya biasa saja di pelajaran PAI, karena saya tidak terlalu suka terhadap pelajaran PAI akan tetapi saya lebih suka di pelajaran yang lain selain PAI, namun demikian, Pandangan saya tentang pelajaran PAI baik, karena menurut saya di pelajaran PAI tidak mengajari hal-hal yang menyimpang dari agama. Kalau mengenai aswaja bagi saya di pelajaran aswaja sangat baik dan saya suka, karena di pelajaran aswaja diajari secara bertahap dan detail tentang sunnah-sunnah Rasul dan NU.”

Hal ini menunjukkan siswa-siswi di lembaga pendidikan NU memberikan pemaknaannya yang positif bahwa mereka menyukai pelajaran pendidikan agama Islam lebih-lebih pada aswaja yang menjadi identitas organisasi kemasyarakatan di lingkungan sekolahnya. Suhaini Menegaskan;

“Saya sangat menyukai pelajaran PAI, Karena dapat mempelajari agama lebih dalam lagi, dengan belajar PAI kita dapat mengetahui mana yang tidak dan boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan tentang pelajaran Aswaja ke NU-an itu Sangat Baik, karena yang sebelumnya tidak mengetahui adanya NU, kita dapat mengetahuinya, serta bisa tahu dalam perbedaan organisasi kemasyarakatan Islam.”

Hal ini juga disampaikan oleh Mohammad Zikri Rabbani dari SMA Wachid Hasyim: “Pandangan saya tentang pelajaran PAI baik, karena pelajaran PAI enak, Baik, karena dipelajari tentang sunnah NU, mengajarkan tentang keterbukaan berfikir adalah ketika tanya jawab di sela pelajaran.”

Fadil Muhammad Ramadhani juga menyatakan: “Saya sangat menyukai pelajaran PAI, Karena di pelajaran PAI saya bisa mempelajari tentang agama lebih dalam. Pandangan saya tentang pelajaran PAI sangat bagus dan kejelasan materi yang diampaikan cukup baik, baik, karena aswaja juga mempelajari tentang sunnah.”

Demikian juga Moh Ridwan;

“Saya sangat menyukai pelajaran PAI, karena gurunya baik selain itu pelajaran yang disampaikan guru juga santai, Pandangan saya tentang pelajaran PAI sangat baik, karena di pelajaran PAIajari juga pelajaran tentang sejarah perkembangan islam, bagi saya di pelajaran aswaja asyik, karena cara mengajar gurunya menyenangkan, selain itu guru mengajar meskipun santai tapi detail, kami bisa memahami ajaran NU, sekolah kami NU sudah tentu harus tahu tentang NU.”

Muhammad Irfan Syauqi siswa Wahid Hasyim menyatakan dengan lebih terperinci tentang hal ini);

“Iya, saya suka pelajaran PAI karena dengan pembelajaran PAI kita bisa mendalami ajaran-ajaran keagamaan. Pandangan saya terhadap pelajaran PAI adalah pembelajaran PAI sangat senang karena dengan pembelajaran ini dapat memberikan pemahaman tentang ajaran keagamaan, Pelajaran Aswaja ke NU-an menurut saya juga sangat baik, karena melalui pembelajaran ini kita mengetahui perbedaan pemikiran dan pemahaman para imam madzhab dalam menghukumi suatu peribadatan. pembelajaran aswaja juga mengajarkan keterbukaan berfikir, toleransi, ukhuwah dan sebagainya, ada juga materi pembelajaran hadits yang berisikan hukum-hukum terhadap suatu peribadatan, biasanya memberikan perbandingan atau perbedaan para imam madzhab dalam menghukumi sesuatu. Menurut saya, dalam pelajaran Aswaja yang mendorong kegiatan keterbukaan berfikir juga terletak pada materi pembelajaran yang membahas tentang banyak perbedaan pemahaman para imam madzhab dalam mempraktekkan sebuah peribadatan seperti perbedaan antara praktek keagamaan NU dan Muhammadiyyah.”

Hal serupa juga disampaikan oleh Ahmad Muazzam;

“Iya, saya suka pelajaran PAI karena dengan pembelajaran PAI kita bisa memperdalam ajaran-ajaran keagamaan dan mengetahui wujud praktik keagamanya, Pandangan saya terhadap pelajaran PAI adalah pembelajaran PAI sangat senang karena materi pembelajaran PAI disampaikan secara rinci dan disertakan contoh-contohnya serta memberikan siswa kesempatan untuk berfikir. Pelajaran Aswaja ke NU-an menurut saya juga sangat baik, karena melalui pembelajaran ini kita mengetahui keilmuan tentang perbedaan pemikiran dan pemahaman para imam madzhab dalam menghukumi suatu

peribadatan dan pembelajaran ini juga memberikan upaya kepada siswa untuk berfikir dalam melihat wujud praktik keagamaan para imam madzhab.”

Berkaitan dengan keorganisasian dan lingkungan sekolah, ada beberapa pernyataan yang berbeda di antara siswa, sebagian menyampaikan bahwa tidak ada keharusan dari sekolah sekalipun berada di bawah naungan NU, dan sebagian yang lain mengakui bahwa ada keharusan mengikuti NU. Hal yang pertama ini yakni tidak adanya keharusan disampaikan oleh Irmaniatul Hasanah (Ma'arif 3) bahwa sekolah tidak mengharuskan siswanya untuk mengikuti NU ataupun aktif dalam keorganisasian NU: “saya aktif NU, karena saya sebagai pengurus, saya diberikan kebebasan dalam memilih organisasi, guru tidak mengharuskan ikut NU, sekolah tidak mengharuskan, orang tua juga tidak memberi pemahaman organisasi.”

Hal yang sama disampaikan oleh Ismawati yang menyatakan: “saya tidak aktif di NU, karena saya bukan pengurus, guru tidak mengharuskan mengikuti Aswaja dan NU, dan saya diberikan kebebasan dalam memilih organisasi, sekolah tidak mengharuskan siswa mengikuti NU, orang tua saya juga tidak memberi pemahaman tentang organisasi.

Begitu juga Siti Maimunah yang menegaskan bahwa tidak ada keharusan untuk mengikuti NU:

“Saya *tidak* aktif di organisasi NU, karena saya bukan pengurus, siswa tidak diharuskan mengikuti Aswaja dan NU, saya diberikan kebebasan dalam memilih organisasi, oleh sekolah siswa tidak diharuskan ikut NU, sebenarnya orang tua saya tidak terlalu mengetahui dan mengatur tentang organisasi apa yang saya ikuti di sekolah.”

Demikian juga apa yang disampaikan oleh Kusmiati:

“Iya saya aktif di organisasi NU, karena saya menjabat sebagai ketua PK IPPNU di SMA Maarif 3 ini, saya diberikan kebebasan dalam memilih organisasi, siswa tidak diharuskan mengikuti Aswaja dan NU, siswa tidak diharuskan mengikuti NU akan tetapi ada dorongan untuk mengikuti NU, kalau orang tua saya tidak terlalu mengetahui dan mengatur tentang organisasi apa yang saya ikuti di sekolah.”

Sedangkan siswa yang merasakan adanya keharusan dari sekolah sebagaimana disampaikan oleh Moh Ridwan, siswa Wachid Hasyim, yang menyatakan;

“Iya saya aktif di organisasi NU, karena ada kajiannya dan itu baik menurut saya, karena bisa menambah ilmu dan wawasan, saya diberikan kebebasan dalam memilih organisasi, tidak, guru PAI menurut saya tidak memaksa saya untuk mengikuti NU. Karena Lembaga ini berada di bawah naungan NU, jadi secara otomatis siswa diharuskan mengikuti NU. orang tua saya turut andil juga dalam pemahaman organisasi kemasyarakatan akan tetapi beliau memberi kebebasan kepada saya.”

Hal yang sama disampaikan oleh Fadil Muhammad Ramadhani dari SMA Ma'arif 3;

“Guru tidak mengharuskan siswa untuk ikut NU, karena sekolah sudah di bawah naungan NU, ya ikut NU. dari orang tua saya sendiri memang memberikan pemahaman kepada saya tentang organisasi kemasyarakatan. saya tidak diberi kebebasan, karena orang tua saya sendiri ikut NU. Tapi saya tidak aktif di organisasi NU, karena saya kurang menyukai ketika ada kegiatan.”

Muhammad Sufwan Syafi memberikan keterangan;

“Guru aswaja tidak mengharuskan anda agar hanya mengikuti NU dan aswaja. Kalau dari sekolah mengharuskan mengikuti NU, Iya, orang tua juga. Saya aktif dalam organisasi NU karena bisa mendorong keterbukaan berfikir untuk kemudian mengetahui perbedaan-perbedaan antara ajaran-ajaran yang dimuat dalam organisasi NU sendiri seperti pengajian, istighasah dan juga dapat membangun banyak relasi“.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Muhammad Ali Attamasimi, siswa kelas XI, SMA Ma'arif 3; “Iya, Saya aktif dalam organisasi NU seperti pengajian karena bisa membangun pola pikir kita dalam menerapkan ajaran Islam. Ini juga keharusan dari sekolah.orang tua juga.”

Berbicara mengenai pengaruh aswaja dalam menyikapi perbedaan pemahaman dengan organisasi lain mereka seluruhnya menegaskan bahwa mereka tetap menghormati terhadap pemikiran selain NU. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Syakila Qurratul Uyun, SMA Ma'arif 1;

“Saya aktif di organisasi NU, karena saya menjabat sebagai ketua PK IPPNU di SMA Maarif 1 ini, dalam hal perbedaan organisasi saya memberikan toleransi, karena kami diajarkan tentang Bhinneka Tunggal Ika, siswa yang berbeda organisasi saya tidak mempermasalahkan, dan tidak membedakan”.

Pernyataan yang sama disampaikan oleh Siti Subaidah, siswi kelas XI IPS; “Tentang perbedaan organisasi, saya sendiri tidak terlalu mempermasalahakan hal itu, karena hal itu merupakan toleransi sesama manusia. Tapi di sekolah ini tidak ada yang berbeda organisasi ”.

Hal in menunjukkan bahwa siswa-siswa lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan NU lebih mengedepankan toleransi dalam perbedaan pemahaman, perbedaan organisasi dan perbedaan pandangan di antara mereka. Eko Ardian Putra Finata menyatakan;

“Menurut saya, dalam pembelajaran PAI mengajarkan keterbukaan berfikir yaitu terletak pada bagian pembelajaran tentang perbedaan madzhab di mana hal ini diwujudkan dengan adanya perbedaan-perbedaan pemahaman dalam praktek-praktek keagamaan. Pandangan saya terhadap siswa yang berbeda organisasi yaitu dengan tetap bersikap toleransi dan saling menghargai, tidak mencela antara satu dengan yang lain karena saya menyakini bahwa setiap organisasi memiliki pandangannya masing-masing.”

Hal yang sama disampaikan oleh Muhammad Sufwan Syafi, siswa SMA Ma’arif 3 Pamekasan;

“Saya aktif dalam organisasi NU karena bisa mendorong keterbukaan berfikir untuk kemudian mengetahui perbedaan-perbedaan antara ajaran-ajaran yang dimuat dalam organisasi NU sendiri seperti pengajian, istighasah dan juga dapat membangun banyak relasi (perteman). Pandangan saya terhadap siswa yang berbeda organisasi yaitu saling menghargai antara teman, saling menghormati apabila mereka mengemukakan pendapatnya”.

Misbahus Surur juga menyatakan;

“Menurut saya, dalam pelajaran Aswaja yang mendorong kegiatan keterbukaan berfikir terletak pada pembelajaran tentang perbedaan madzhab dalam islam dan perbedaan dalam menghukumi sesuatu, biasanya di konsep dengan diskusi antara siswa sebelum pembelajaran di akhiri. Pandangan saya terhadap siswa yang berbeda organisasi yaitu dengan saling menghormati karena saya meyakini bahwa mereka memiliki pandangannya masing-masing. Perlakuan Guru PAI terhadap siswa yang berbeda organisasi tetap bersikap toleransi, saling menghargai serta mengayomi, tidak membeda-bedakannya, karena sikap yang seperti itu dapat kita tiru dalam berinteraksi dengan orang lain yang berbeda pemahaman.”

Hasil wawancara ini juga dikuatkan oleh data dokumen dan hasil observasi yang menegaskan bahwa pelajaran aswaja merupakan pelajaran yang diutamakan

dalam konteks sekolah-sekolah di bawah naungan LP Ma'arif NU. Hal ini bisa dilihat dari kajian tambahan baik berupa kegiatan ekstra yang diadakan oleh IPNU, IPPNU ataupun kegiatan yang diinisiasi oleh guru pengampu aswaja sebagaimana dijalankan oleh siswa Wachid Hasyim yang mengadakan istighasah dan yasinan setiap bulan dengan cara bergantian di rumah siswa.

Kenyataan ini diperkuat lagi dengan adanya simbol dan logo-logo organisasi NU baik di kantor kepala sekolah, di ruang kelas, kalender yang terpajang di sekolah dan di rumah-rumah siswa, termasuk seragam berupa jaket dan baju-baju NU yang dipakai oleh sebagian siswa terutama yang aktif dalam organisasi NU. Simbol dengan bacaan *nahdlatul ulama'* juga terdapat di setiap pintu masuk sekolah-sekolah NU serta foto-foto ulama' pendiri dan tokoh-tokoh NU terpajang di ruang kantor dan sebagian rumah siswa.

Namun demikian, keterbukaan berfikir siswa menghadapi siswa-siswa lain dalam organisasi selain NU juga nampak dari cara mereka berdiskusi. Mereka memberikan kesempatan dan penghargaan pada pandangan yang berbeda sekalipun untuk konteks Ma'arif tidak ada satupun siswa yang berbeda organisasi, selain NU, karena semuanya adalah merupakan keluarga NU. Demikian juga SMA Wachid Hasyim, MA al-Mas'udiyah Sreseh Sampang yang semuanya merupakan anggota NU. Berbeda dengan SMA NU Sumenep, di sana terdapat 3 orang siswa yang berlainan organisasi, yakni berasal dari organisasi Muhammadiyah karena memang orang tua dan keluarganya mengikuti organisasi Muhammadiyah.

Sekalipun berbeda organisasi mereka mampu berinteraksi dengan baik, saling menghargai, tetap bergaul satu sama lain. Hal ini nampak dalam keseharian mereka di sekolah, lebih-lebih dalam sesi diskusi.

Konstruksi ideologis organisasi menegaskan bahwa pemaknaan yang dialami oleh siswa dengan batasan sosio-ideologis NU yang kuat merupakan wujud interpretasi atas realitas objektif di luar diri siswa dan sebagai refleksi atas kebiasaan di dalam keluarga, lembaga pendidikan dan masyarakat yang mereka dapatkan di luar regulasi dirinya sendiri. Hal ini merupakan implikasi dari internalisasi yang dialami oleh siswa yang dalam pandangan Berger dan Thomas Luckman dialami dari sejak kecil melalui

eksternalisasi dan objektivasi yang kemudian bisa menghasilkan pemikiran, suatu interpretasi dari segala realitas yang ada, termasuk apa dan bagaimana mereka menjalani kehidupan sosial budaya dalam kehidupan sehari-hari (Thomas Luckman Peter L. Berger, 2018). Dengan kata lain, pemaknaan yang dialami oleh siswa adalah tendensi subjektif dalam kungkungan sosialisasinya bersama lingkungannya.

Hal ini sesuai dengan penegasan Herbert Mead bahwa penggunaan simbol, baik bahasa ataupun tindakan yang digunakan dalam interaksi sosial akan melahirkan mind (fikiran) yang memungkinkan adanya internalisasi masyarakat (Prasanti & Indriani, 2016). Dalam konteks siswa aswaja, kultur NU, organisasi NU, sekolah NU, pondok pesantren NU merupakan kondisi sosial yang membentuk interaksi sosial di dalamnya dengan simbol-simbol yang identik, baik bahasa, kiai, ideologi dan pemahaman keagamaan NU itu sendiri serta lambang-lambang yang menjadi identitasnya. Oleh karena itu, kondisi ini menjadi media interaksi yang mengikat antara satu individu dengan individu yang lain dalam ruang yang sama, dilakukan secara terus menerus, dan membentuk habit serta emosi yang kuat pada organisasi. Realitas seperti inilah yang disebut oleh Berger dan Luckman sebagai realitas simbolik, bahwa realitas objektif masyarakat merupakan realitas dalam simbol-simbol sosial yang mengalami interaksi antara yang satu dengan yang lainnya di tengah kesadaran self dan mind individu (Dharma, 2018; Karman, 2015).

Hal ini berarti bahwa siswa yang tidak mengalami keterpaksaan karena tidak diharuskan oleh lembaga pendidikan dan orang tuanya sekalipun sesungguhnya bisa disangsikan kemerdekaannya dalam belajar, karena mereka hanya merepresentasi kehendak, pemikiran dan pola yang diinginkan oleh ideologi organisasinya, organisasi yang senantiasa diinternalisasi sejak mereka kecil. Hanya saja proses pengkondisian ini bersifat alamiah, terjadi pada seluruh manusia dengan realitas sosial yang mengitarinya. Tidak ada manusia yang terlepas sama sekali dari ruang lingkup sosialnya ini.

Dalam konteks pengetahuan, Peter L. Berger dan Thomas Luckman menempatkan kecenderungan ini sebagai “Konstruksi realitas sosial”, suatu teori yang memiliki pengaruh dalam tradisi sosiokultural manusia dengan asumsi dasar bahwa

knowledge as culture (pengetahuan sebagai budaya), bahwa knowledge is socially determined (pengetahuan ditentukan oleh lingkungan sosial), dan bahwa struktur sosial masyarakat akan melahirkan pengetahuan. Di sisi yang lain, bahwa realitas sosial dibangun melalui pengetahuan atau apa yang diistilahkan sebagai reality is socially constructed by knowledges (Dharma, 2018; Karman, 2015; Thomas Luckman Peter L. Berger, 2018; Thomas Luckmann Peter L. Berger, 1991).

Faham ini menguatkan pandangan Herbert Mead dan semakin menegaskan posisi siswa NU dengan realitas sosialnya, karena Peter L. Berger dan Thomas Luckman juga menempatkan pengetahuan sebagai hasil interaksi simbolik kelompok masyarakat, dibangun oleh lingkungan sosial, serta menjadi produk dari sosial budaya masyarakat tertentu atau kelompok tertentu (Sulaiman, 2016). Realitas hidup yang dialami siswa NU dalam kehidupan sehari-hari sangat bersifat komunal sesuai dengan garis konstruksi realitas sosial ini. Tentu dalam proses interaksi ini muncullah pemaknaan sebagai hasil dari interpretasi dan refleksinya atas relitas yang pada gilirannya membentuk suatu tipifikasi, penentuan tipe-tipe tertentu oleh individu secara labelik, seperti pendiam, periang, pendendam, dan sebagainya (Peter L. Berger, 2018). Kondisi ini yang menjadikan siswa NU memiliki asumsi labelik yang sama dan meyakini bahwa mereka sudah berada dalam lingkungan yang tepat dengan segala kemerdekaannya, tanpa paksaan siapapun.

Hal ini tidak lepas dari tendensi ideologi sebagai ide yang menjadi prinsip bersama sehingga membentuk tingkah laku, khususnya dalam berorganisasi. Kata yang dikonsepsi oleh Antoine Destutt De Tracy (1754-1836 M.), seorang pemikir yang berasal dari Prancis sekitar akhir abad ke 18 ini dimaknai sebagai himpunan gagasan dan prinsip hidup yang memutlakkan cara suatu masyarakat seharusnya bekerja, hidup dan diatur dalam sistem komunitas dan kenegaraan tertentu (Althusser, 2014; Usman, 2019). NU sebagai organisasi terbesar sudah menjadi miniatur negara dalam pemahaman masyarakat madura.

Dalam kajian ilmu sosiologi ideologi ditempatkan dalam dua pemaknaan yang berbeda yakni makna struktural dan makna fungsional. Makna fungsionalnya berarti bahwa ideologi sebagai seperangkat gagasan mengenai common goods atau kebaikan

bersama, tentang komunitas masyarakat dan atau negara yang dinilai paling baik. Sedangkan makna strukturalnya menempatkan ideologi sebagai sistem justifikasi atau pembenar atas tindakan dan kebijakan penguasa. (Aligica & Tarko, 2014).

Dalam konteks keagamaan, ideologi berada pada posisi yang sangat dekat dan hampir sama dengan agama. Boleh dibilang Agama adalah ideologi, meskipun ideologi bukanlah agama. Secara fungsional, kaitan keduanya sangat dekat, sama-sama sebagai gagasan, prinsip dan ide yang menjadi rujukan dalam sistem sosial masyarakat (Hartanto, 2016). Namun demikian, derivasi realitas ideologi yang hanya sebagai gagasan komunal dan berdasar pada pragmatisme hidup yang dibuat manusia membedakannya dari realitas agama secara ontologis, karena transendensi agama dengan dimensi supranaturalnya bahwa agama adalah berasal dari Tuhan dan merupakan cara yang Tuhan tentukan untuk mengatur seluruh hidup manusia, memastikan keyakinannya bersifat lebih mendalam.

Pandangan Louis Althusser mengenai overdeterminasi dalam ideologi-ideologi memberi ruang untuk konstruksi sosial seperti ini yang tidak hanya terbatas pada faktor dominasi ekonomi ala marxian, tetapi juga merambah pada aspek yang lebih luas seperti pranata sosial, aturan, gereja, masjid dan sekolah yang berupaya menaturalisasikan status-quo tetap berada dalam garis yang sama dengan dogmatisasi ini. Althusser menilai bahwa apabila ideologi menjadi faktor yang meng-overdeterminasi, maka sebab ekonomi sebagai pangkal paling awal dan berposisi determinan sebelumnya, tidak berarti apa-apa. Di sisi yang lain, pemikiran Antonio Gramsci mengenai hegimoni juga menjadi dasar yang menguatkan bahwa pola yang sama dalam pembelajaran di sekolah sebagaimana yang dialami oleh siswa NU yang memutlakkan internalisasi nilai ideologisnya sebagai sebuah proses hegimoni dalam dogmatisasi yang membatasi terhadap keyakinan lainnya dan meyakini satu jalan hingga penguasaannyapun tak tersadari. Dalam konteks ini, Gramsci meyakini bahwa wilayah politik sekalipun berlangsung melalui ideologi-ideologi ini dan secara mayoritas berpijak pada organisasi sosial yang memberi pengaruh besar pada individu (Beilharz, 2016).

Bersesuaian dengan orientasi ini, lembaga pendidikan dan sistem pembelajaran juga mengenal teori belajar yang disebut sebagai dogmatika, yakni pemantapan terhadap faham keagamaan dan tersampaikan melalui proses belajar mengajar. Sesuai dengan namanya, dogma memberikan penekanan bahwa ajaran agama khususnya ajaran gereja (kristiani) harus disampaikan pada umatnya dalam satu pola internalisasi yang bisa diikuti, diimani dan diterapkan secara seksama (Yewangoe, A.A., 2004). Apa yang ada dalam konteks lembaga pendidikan siswa NU kurang lebih sama dengan pola dogmatika ini.

Oleh karenanya, lembaga pendidikan yang ada memiliki ideologi yang bersifat prinsip, menjadi paradigma serta tolak ukur perilaku siswanya bahkan menjadi target capaian sosial dalam seluruh sistem pendidikannya. Ideologi pendidikan ini mengikuti ritme kelompok dengan sifatnya yang sangat subjektif komunal. Bordeou membincang kategori ini dengan apa yang dikonsepsikannya sebagai *doxa*, yaitu wacana dominan dan tujuan sadar yang ingin dicapai oleh kelompok dan ditentukan oleh lingkungannya baik berupa norma, aturan, atau lembaga yang memutlakkan regulasi eksternal di luar diri siswa (Muhsin, 2017; Zurmailis & Faruk, 2017).

Luluk Muasomah dalam penelitiannya tentang relasi ideologi dan pendidikan menegaskan bahwa terdapat beberapa substansi penting yang harus diingat dalam hubungannya dengan ideologi dalam dunia pendidikan. Pertama, ideologi pada umumnya menjadi alat legitimasi dalam lembaga pendidikan. Kedua, ideologi menjadi sistem kognisi yang menjadikan individu menciptakan arti dan mendapatkan orientasi dalam perbuatannya. Ketiga, ideologi mampu mengontrol perilaku masyarakat, namun tidak sebaliknya, karena masyarakat seringkali tidak mampu mengontrol ideologi mereka. Keempat, ada sebuah proposisi bahwa keputusan atau kebijakan dalam pendidikan merupakan kebijakan yang bersifat ideologis (Muasomah, 2013).

Hal ini sejalan dengan pandangan Paulo Friere (1921-1997) yang menyatakan bahwa di dalam masyarakat terdapat pola dan sistem pendidikan sekolah yang berjalan seperti media penjinakan. Ia merupakan “Pendidikan gaya bank” sebab di dalamnya terdapat hubungan kontradiktif yang bersifat saling menekan. Pendidik diposisikan pada tempat yang atas, sementara peserta didik berada pada posisi di bagian bawah

yang menerima dan cenderung pasrah pada otoritas guru sepenuhnya. Pola pendidikan seperti ini memiliki kecenderungan indoktrinasi, dominasi dan hegemoni karena menggunakan pendekatan ideologis dan meliteristik (Abdillah, 2017; Pouwels, 2019).

Hal ini semakin menegaskan bahwa siswa yang merasa tidak dipaksa sekalipun sesungguhnya berada dalam kondisi semu yang terkondisikan oleh sistem. Lebih dari itu, bagi mereka yang mendapatkan paksaan karena diharuskan oleh lembaga pendidikan dan orang tuanya untuk mengikuti organisasi NU dan mempelajari aswaja sebagai ideologinya, memastikan bahwa kemerdekaannya terenggut dan secara penuh belum didapatkannya. Mereka merasakan adanya keharusan dari sekolah karena sekolah sudah berada di bawah naungan NU, orang tua juga memberikan pemahaman tentang organisasi kemasyarakatan NU sehingga mereka menyesuaikan dengan kehendak lingkungan dan orang tuanya.

NU sebagai sebuah institusi organisasi memiliki semua karakter definitif ini, struktur kuasa, aturan keorganisasian, kepentingan dan nilai-nilai teoritis yang dijadikan rujukan. Bahkan bagi sebagian besar orang Madura, posisi NU bukan hanya sekedar organisasi kemasyarakatan yang bersifat kultural dan menjadi media dalam perekat hubungan silaturahmi serta implementasi cita-cita bersama, tetapi jauh dari itu NU sudah bermetamorfosa mendekati ikatan kelompok, bahkan mendekati agama yang bersifat dogmatis, dan regeneratif (Nor Hasan, 2013; Pribadi, 2013).

Hal ini lebih diperkuat dengan simbol-simbol yang terdapat dalam lingkungan sekolah semua siswa aswaja yang memiliki kesamaan antara yang satu dengan yang lainnya, yaitu warna hijau yang dominan pada bangunan gedung sekolah, lambang sekolah yang identik dengan lambang NU, kalender NU dan semacamnya, yang menegaskan tendensi pemikiran Berger dan Luckman yang merujuk pada paradigma interkasionisme simbolik menemukan pijakannya dan memastikan bahwa realitas simbolik berpengaruh besar karena kondisi sosial yang ada di sana menyajikan objek, simbol dan perspektif yang menjadi pusat kehidupan siswa aswaja sebagai manusianya (Ahmadi, 2008).

Hanya saja, lingkungan yang memaksa dan pemaksaan mereka tentang merdeka dalam belajar dalam lingkungan organisasi NU sebagai organisasi

kemasyarakatan yang secara niscaya mereka harus terima tidak memastikan cara berfikir mereka yang tidak berterima dengan kemerdekaan itu sendiri, karena mereka memiliki pandangan bahwa secara individual mereka menyukai pelajaran PAI, lebih-lebih pada pelajaran aswaja yang menjadi kehasan sekolah-sekolah NU.

BAB IV

IMPLIKASI PEMAKNAAN SISWA ANNAHDHIYAH DAN SISWA AHMADIYAH TERHADAP MERDEKA BELAJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Merdeka belajar dalam proses pembelajaran sesuai dengan yang diungkapkan oleh dari beberapa literatur diartikan sebagai merdeka berpikir, merdeka berinovasi, merdeka belajar mandiri dan kreatif, dan merdeka untuk kebahagiaan (Daga, 2021). Konsep merdeka belajar digagas agar peserta didik memiliki kebebasan dalam berfikir kritis dan cerdas. Dengan cara tersebut, peserta didik dapat lebih leluasa mengembangkan potensi yang dimilikinya, dan tidak didikte oleh guru dan sekolah. Jika kebebasan belajar terpenuhi maka akan tercipta pembelajaran mandiri dan disebut sekolah mandiri.

Adanya kebijakan merdeka belajar ini, Kemendikbud berharap agar implementasi kurikulum dalam proses pembelajaran haruslah menyenangkan ditambah dengan pengembangan berfikir yang inovatif oleh para guru, hal ini dapat menumbuhkan sikap positif siswa dalam merespon pembelajaran. Merdeka belajar merupakan proses pembelajaran secara alami dalam mencapai kemerdekaan berfikir dan berinovasi di pendidikan. Esensi merdeka belajar adalah menggali potensi terbesar para guru dan siswa untuk berinovasi dan meningkatkan kualitas pembelajaran secara mandiri, mandiri yang dimaksud tidak hanya mengikuti proses birokrasi pendidikan tetapi benar-benar inovasi yang dapat memajukan pendidikan dalam menghasilkan sumber daya manusia berdaya saing global (Saleh, 2020).

Hasil penelitian pada siswa yang berbeda kelompok yaitu Ahmadiyah dan Annahdhiyah ini mendapatkan perbedaan hasil pemaknaan dan implikasi yang berbeda pula. Jika siswa Ahmadiyah dengan latar belakang ke-ahmadiyah-nya bersekolah di sekolah mayoritas (NU) berhadapan dengan ideologi mayoritas pula. Berbeda dengan siswa Annahdhiyah yang berlatar belakang NU dan bersekolah di sekolah-sekolah NU. Terdapat paling tidak dua implikasi yang berbeda pula, yaitu: penguatan dalam artinya bertambah kuatnya ideologi Annahdhiyah dan ketahanan dalam arti terujinya ideologi siswa Ahmadiyah. Selain itu lahirnya pemahaman inklusif yang satu hanya pada tataran teoritis belaka, dan yang satunya lagi bersifat praktis.

1. Penguatan Ideologi Siswa Annahdhiyah dan Ketahanan Ideologi Siswa Ahmadiyah

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam baik di sekolah-sekolah umum, lebih-lebih di sekolah yang berbasis organisasi kemasyarakatan, bagi siswa Annahdhiyah memiliki pengaruh yang nyata bagi penguatan ideologi mereka. Siswa Annahdhiyah yang lahir dari keluarga NU dan bersekolah di sekolah NU, secara ideologis tidak memiliki kendala apapun. Linieritas ini bahkan memperkuat basis ideologi mereka.

Bagi siswa Ahmadiyah, dan mungkin kelompok minoritas yang lain, Pendidikan Agama Islam di sekolah-sekolah umum sebaliknya dapat menjadi semacam ujian bagi eksistensi ideologi mereka. Mampukah kelompok-kelompok ini bertahan pada ideologi asal mereka, atau mungkin melebur mengikuti ideology mayoritas.

Berbeda dengan Ahmadiyah, bagi siswa Annahdhiyah sekolah menjadi semacam tempat memperkuat ideologi. Hal ini mislanya seperti yang Misbahus Surur juga memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Sekolah mengharuskan agar mengikuti NU, orang tua juga turut menentukan terhadap faham keorganisasian saya, makanya saya aktif dalam organisasi NU dengan mengikuti berbagai macam kegiatan seperti kajian-kajian keislaman, istighasah, karena dengan keaktifan kita mengikuti organisasi lebih bisa memberikan pemahaman yang lebih luas lagi terkait hukum-hukum dari suatu praktek keagamaan.”

Jika bagi kelompok mayoritas (NU), sekolah merupakan perpanjangan dari keluarga dalam mewariskan ideologi NU (Aswaja), maka bagi Ahmadiyah, justru menjadi semacam tempat untuk menempa ideologi yang dibawa dari keluarga mereka. Seberapa kuat mereka dapat mempertahankan ajaran-ajaran Ahmadiyah, atau malah sebaliknya ikut larut dalam ajaran-ajaran NU (Aswaja) yang didapatkan di sekolah.

Data hasil penelitian yang didapatkan membuktikan bahwa siswa Ahmadiyah dapat melewati berbagai ujian tersebut dengan tetap bertahan pada ideologi yang dibawa. Materi Pendidikan Agama Islam NU di dalam dan di luar kelas nyatanya tidak dapat mengubah keyakinan mereka. Mereka dapat menerima pada ajaran yang memang sama antara mereka dengan NU. Namun, pada masalah-masalah yang memang

menjadi pokok perbedaan dengan Ahmadiyah, siswa Ahmadiyah tetap bertahan dengan keyakinan semula.

2. Pemahaman Inklusif

Inklusif dapat diartikan sebagai cara pandang seseorang akan adanya sebuah perbedaan. Sikap ini juga sering dikaitkan dengan pandangan positif terhadap sebuah perbedaan. Pandangan inklusif muncul dari pengetahuan atau pengalaman-pengalaman berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang-orang yang berbeda.

Pada kasus An-Nahdhiyah di Madura, pandangan atau sikap inklusif lahir dari pengetahuan akan ajaran Aswaja itu sendiri yang memiliki karakteristik moderat. Berbeda dengan Ahmadiyah di Lombok, pemahaman inklusif ini, sebagaimana yang ditunjukkan pada data hasil wawancara, didapatkan melalui pengalaman berinteraksi dengan kelompok mayoritas di sekolah.

Pemahaman inklusif ini digambarkan oleh SA dengan mengatakan bahwa belajar keyakinan yang berbeda (ajaran mayoritas) diniatkan untuk tujuan pengetahuan semata. SA mengatakan bahwa mempelajari ajaran kelompok lain dapat menambah pengetahuan tentang perbedaan dan meningkatkan sikap inklusif.

Pengalaman interaksi sehari-hari di sekolah mendidik para siswa Ahmadiyah untuk senantiasa menyesuaikan diri dengan konteks sosialnya. Selain itu persentuhannya dengan materi Pendidikan Agama Islam menjadikannya para siswa Ahmadiyah memiliki pemahaman yang lebih eksklusif dibanding dengan siswa lainnya. Siswa Ahmadiyah memiliki tidak hanya pengetahuan tentang perbedaan, tetapi juga dapat mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari di sekolah.

Sasaran dominasi, dalam hal ini siswa Ahmadiyah, juga tidak bisa dipandang sebagai individu-individu pasif. Mereka subjek otonom yang memiliki agensi untuk menentukan pilihan, melakukan siasat, atau melawan dengan cara mereka sendiri. Tindakan menyelamatkan diri dengan diam dan bertindak adaptif juga merupakan bentuk perlawanan terhadap dominasi kelompok lain. Mereka mempunyai cara sendiri untuk mempertahankan ideologi, bahkan ketika negara itu sendiri yang jadi musuhnya. Selain bertahan mereka juga tetap bertemu dalam identitas lainnya. Cara-

cara bertahannya kelompok ini di sekolah, di sisi lain merupakan tindakan inovatif yang dilakukan atas inisiatif mereka sendiri, bukan atas instruksi orang lain.

Adapaun bagi siswa Annahdhiyah di Madura yang bersosialisasi secara linier, tidak menemui dalam prosesnya. Pengaruh aswaja dalam menyikapi perbedaan pemahaman dengan organisasi lain, seluruhnya menegaskan bahwa mereka tetap menghormati terhadap pemikiran selain NU. Mereka lebih mengedepankan toleransi dalam perbedaan pemahaman, perbedaan organisasi dan perbedaan pandangan di antara mereka. Hal ini karena pembelajaran PAI dan aswaja mengajarkan keterbukaan berfikir, tentang inklusivisme dan tentang perbedaan madzhab dimana hal ini diwujudkan dengan adanya perbedaan-perbedaan pemahaman dalam praktek-praktek keagamaan.

Hal ini ditegaskan oleh Muhammad Ali Attamasimi, Kelas XI;

“Menurut saya, dalam pelajaran Aswaja yang mendorong kegiatan keterbukaan berfikir juga terletak pada materi pembelajaran yang membahas tentang banyak perbedaan pemahaman para imam madzhab dalam mempraktekkan sebuah peribadatan seperti perbedaan antara praktek keagamaan NU dan Muhammadiyah. Pandangan saya terhadap siswa yang berbeda organisasi yaitu tetap toleransi. Perlakuan Guru PAI terhadap siswa yang berbeda organisasi tetap bersikap ramah toleransi, saling menghargai serta mengayomi, tidak membeda-bedakannya serta memberikan kesempatan yang sama apabila mereka mengemukakan pendapat. Iya, ini dapat dijadikan contoh dalam bermuamalah kepada orang lain khususnya bagi orang yang berbeda pendapat.”

Keterbukaan berfikir siswa menghadapi siswa-siswa lain dalam organisasi selain NU juga nampak dari cara mereka berdiskusi. Mereka memberikan kesempatan dan penghargaan pada pandangan yang berbeda sekalipun, dan sekalipun berbeda organisasi mereka mampu berinteraksi dengan baik, saling menghargai, dan tetap bergaul satu sama lain. Barangkali tendensi seperti ini yang kemudian disebut oleh Norbert Elias sebagai civilising processes. Elias berpandangan bahwa efek proses pembudayaan ini akan berimplikasi pada lahirnya kelompok manusia yang memenuhi kategori homo aperti, yaitu manusia yang berfikir terbuka dan mengakui barisan panjang manusia yang lain (Beilharz, 2016)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Siswa Ahmadiyah di Lombok mengalami posisi di antara dua ideologi, yaitu ideologi Ahmadiyah sendiri dan ideologi mayoritas. Ideologi Ahmadiyah menjadi latar subjektif siswa Ahmadiyah, dan ideologi mayoritas menjadi realitas objektif yang lain. Lingkungan sekolah yang memaksa dan pemaksaan mereka tentang merdeka dalam belajar dalam lingkungan mayoritas yang secara niscaya mereka harus terima tidak memastikan cara berfikir mereka yang tidak berterima dengan kemerdekaan itu sendiri, karena mereka memiliki pandangan bahwa secara individual mereka menyukai pelajaran PAI. Mereka merasa senang pada satu bagian, dan merasa terpaksa pada bagian yang lain. Dalam artian bahwa mereka memaknai merdeka belajar tidak secara penuh.

Pemaksaan siswa Annahdhiyah di Madura dengan batasan sosio-ideologis NU yang kuat merupakan wujud interpretasi atas realitas objektif di luar diri siswa dan sebagai refleksi atas kebiasaan di dalam keluarga, lembaga pendidikan dan masyarakat yang mereka dapatkan di luar regulasi dirinya sendiri. Hal ini merupakan implikasi dari internalisasi yang dialami oleh siswa yang dialami dari sejak kecil melalui eksternalisasi dan objektivasi yang kemudian bisa menghasilkan pemikiran, suatu interpretasi dari segala realitas yang ada, termasuk apa dan bagaimana mereka menjalani kehidupan sosial budaya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, pemaksaan yang dialami oleh siswa adalah tendensi subjektif dalam kungkungan sosialisasinya bersama lingkungannya.

Implikasi pemaksaan siswa Ahmadiyah terhadap merdeka belajar adalah terujinya ketahanan ideologis siswa Ahmadiyah. Hal tersebut dibuktikan dengan tetapnya mereka memegang teguh ajaran Ahmadiyah. Mereka tidak terpengaruh sama sekali dengan ajaran mayoritas pada beberapa aspek yang dipertentangkan. Selain itu bersekolah di tempat mayoritas menjadikan pemahaman siswa Ahmadiyah menjadi lebih eksklusif. Hal ini karena siswa Ahmadiyah mengetahui

dan mengalami berbagai perbedaan ajaran tersebut secara langsung. Inklusifisme siswa Ahmadiyah didapatkan melalui pengetahuan dan pengalaman langsung di sekolah. Sedangkan bagi siswa Annahdhiyah implikasi dari pemaknaan mereka adalah penguatan ideologi. Mereka yang berlatar belakang NU, berproses di NU, sehingga pemahaman mereka menjadi lebih kuat. Begitu juga pada sikap inklusif, berbeda dengan siswa Ahmadiyah, inklusifisme tersebut didapatkan melalui pengetahuan belaka, karena mereka bersekolah di tempat sendiri yaitu lembaga-lembaga pendidikan NU.

B. Saran

Bagi pemerintah sebagai pengayom masyarakat harus dapat memberikan hak yang sama terutama dalam pemanfaatan ruang publik. Kebebasan beragama bukan hanya milik kelompok mayoritas. Kelompok minoritas juga perlu mendapatkan ruang untuk mengekspresikan keyakinan mereka dengan aman di ruang public tanpa adanya tekanan.

Ruang publik idealnya adalah tempat yang setara bagi semua kelompok dengan berbagai latar belakang identitasnya untuk mengekspresikan diri secara bebas dalam berbagai hak-haknya. Pemerintah harus dapat menjamin keamanan dan kenyamanan secara setara bagi semua kalangan tanpa membeda-bedakan perlakuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, R. (2017). Analisis Teori Dehumanisasi Pendidikan Paulo Freire. *Jurnal Aqidah Dan Filsafat Islam*, 2(1), 1–21.
- Abdurrahman. (2017). Sumbangan Pemikiran Nahdlatul Ulama (Nu) Terhadap Modernisasi Pendidikan Islam Di Indonesia. *Consilium: Kajian Konseling Dan Ilmu Keagamaan*, 4(4), 1–21.
- Abshor, M. U., & Khotimah, H. (2020). ETIKA ILMIAH ISLAM SEBAGAI WUJUD TOLERANSI (Analisis Pemikiran Taha Jabir al-Alwani dalam Kitab Adab al-Ikhtilafi fi al-Islami). *Al-Banjari : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman*, 19(1), 55–83. <https://doi.org/10.18592/al-banjari.v19i1.3517>
- Ahmadi, D. (2008). Interaksi Simbolik: Suatu Pengantar. *Mediator: Jurnal Komunikasi*, 9(2), 301–316. <https://doi.org/10.29313/mediator.v9i2.1115>
- Ainia, D. K. (2020). “Merdeka Belajar dalam Pandangan Ki Hadjar Dewantara dan Relevansinya Bagi Pengembangan Pendidikan Karakter.” *Jurnal Filsafat Indonesia*, 3(3), 95–101.
- Aligica, P. D., & Tarko, V. (2014). Crony capitalism: Rent seeking, institutions and ideology. *Kyklos*, 67(2), 156–176. <https://doi.org/10.1111/kykl.12048>
- Althusser, L. (2014). *On the Reproduction of Capitalislll Ideology and Ideological State Apparatuses*. Verso.
- Brewer, A. (2016). *Kajian Kritis Das Kapital Karl Marx*. Narasi.
- Budiwanti, Erni. (2022). *Mengelola Keragaman Agama di Ruang Publik*. Badan Riset dan Inovasi Nasional.
- Creswell, W. J. (2018). *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset* (3rd ed.). Pustaka Pelajar.
- Daga, A. T. (2021). Makna Merdeka Belajar dan Penguatan Peran Guru di Sekolah Dasar. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 7(3), 1075–1090. <https://doi.org/10.31949/educatio.v7i3.1279>
- Dawud Hasan, M. A. S. (2019). PENDIDIKAN ISLAM DI SMA MUHAMMADIYAH DAN SMA MA'ARIF NU PANDAAN STUDI KOMPARASI DALAM PENANAMAN PAHAM ASWAJA. *AL MURABBI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 4(2), 275–288.

- Dharma, F. A. (2018). Konstruksi Realitas Sosial : Pemikiran Peter L . Berger Tentang Kenyataan Sosial. *Kanal; Jurnal Ilmu Komunikasi*, 7(1), 1–9. <https://doi.org/10.21070/kanal.v>
- Farihah, I. (2015). Filsafat materialisme Karl Marx (Epistimologi Dialectical and Historical Materialism). *Jurnal Ilmu Aqidah Dan Studi Keagamaan*, 3(2), 431–454.
- Hanafi, I. (2018). AGAMA DALAM BAYANG-BAYANG FANATISME; Sebuah upaya Mengelola Konflik Agama. *Toleransi: Media Komunikasi Umat Beragama*, 10(1), 48–67.
- Hartanto, R. D. (2016). Mengkaji Relasi Agama dan Ideologi. *DINIKA*, 1(1), 79–91.
- Karlina Supelli, D. (2013). Fanatisme, Ektremisme, Dan Penyingkiran Ciri Antropologis Pengetahuan. *Jurnal Kawistara*, 3(2), 220–223. <https://doi.org/10.22146/kawistara.3984>
- Karman. (2015). Konstruksi Realitas Sosial Sebagai Gerakan Pemikiran (Sebuah Telaah Teoretis Terhadap Konstruksi Realitas Peter L. Berger). *Penelitian Dan Pengembangan Komunikasi Dan Informatika*, 5(3), 11–23.
- Muasomah, L. (2013). Relasi Ideologi dan Pendidikan. *Al Mabsut; Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 6(1), 255–264.
- Muhsin, I. (2017). Endogamous Marriage of Jamaah Tarbiah: A Sociological Study of the Jamaah Tarbiyah in Salatiga. *Ahkam - Jurnal Ilmu Syariah*, 17(1), 25–46. <https://doi.org/10.15408/AJIS,V1711.6226>
- Mustagfiroh, S. (2020). Konsep “ Merdeka Belajar ” Perspektif Aliran Progresivisme di Perguruan Tinggi. *Jurnal Studi Guru Dan Pembelajaran*, 3(1), 141–147.
- Ngangi, C. R. (2011). Konstruksi Sosial dalam Realitas Sosial. *ASE; Agri-Sosio Ekonomi*, 7(2), 1–4.
- Nor Hasan. (2013). dinamika kehidupan beragama kaum nahdliyin di pamekasan. *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*, 8(September), 84–102.
- Nursalam, 2016, metode penelitian. (2013). 濟無No Title No Title. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Panae, A., & Islahuddin. (2020). Pertentangan kelas dalam Cerpen Kuda Itu Seperti Manusia Juga karya Kuntowijoyo : Analisis sosiologi sastra marxis. *Senasbasa*,

4, 249–258.

Peter L. Berger, T. L. (1991). *The Sosial Contrsuction of Reality*. Penguin Books.

Peter L. Berger, T. L. (2018). *Tafsir Sosial Atas Kenyataan, Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan* (H. Basari (ed.); Cetakan ke). LP3ES.

Pouwels, J. (2019). We are in need of each other. Paulo Freire and the role of conflicts in education. *International Journal of Social Pedagogy*, 8(1), 1–15. <https://doi.org/10.14324/111.444.ijsp.2019.v7.1.009>

Prasanti, D., & Indriani, S. S. (2016). Pemaknaan Simbol Dalam Komunitas ‘Brotherhood’ (Konstruksi Makna Simbol Sebagai Identitas Diri dalam Komunitas ‘Brotherhood’ di Bandung). *Semiotika*, 10(1), 1–24.

Pribadi, Y. (2013). Religious Networks in Madura: Pesantren, Nahdlatul Ulama, and Kiai as the Core of Santri Culture. *Al-Jami’ah: Journal of Islamic Studies*, 51(1), 1. <https://doi.org/10.14421/ajis.2013.511.1-32>

Smith, J. A., Flowers, P., & Larkin, M. (2009). *Interpretative Phenomenological Analysis : Theory , Method and Research*. January.

Subkhan, E. (2018). Ideologi, kekuasaan, dan pengaruhnya pada arah sistem pendidikan nasional Indonesia (1950-1965). *Journal of Indonesian History*, 7(1), 19–34.

Sulaiman, A. (2016). Memahami Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger. *Society*, 6(1), 15–22.

Ulfah, N. M., & Istiyani, D. (2016). Etika Dalam Kehidupan Modern : Studi Pemikiran Sufistik Hamka. *Esoterik: Jurnal Akhlak Dan Tasawuf*, 2(1), 95–109.

Ulum, M. (2018). Fikih Sosial (Pendekatan Teori Hubungan Otoritas dan Konflik Sosial Ralf Dahrendolf dan Kajian Kasus Konflik Otoritas Sunni-Syi’ah di Sampang Madura). *Syaikhuna: Jurnal Pendidikan Dan Pranata Islam*, 9(1), 1–27. <https://doi.org/10.36835/syaikhuna.v9i1.3188>

Wahyudi, Catur (2015) *Marginalisasi dan Keberadaan Masyarakat*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Wahyudi, Catur (2015) ‘Peminggiran Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Penyesuaian Tindakan Sosialnya’. *Junal Indo-Islamika*, Vol. 2. No. 2.

Yewangoe, A.A., D. (2004). *Kontekstualisasi Pemikiran Dogmatika di Indonesia*. BPK. Gunung Mulia.

Zurmailis, & Faruk. (2017). Doksa, Kekerasan Simbolik Dan Habitus Yang Ditumpangi Dalam Konstruksi Kebudayaan Di Dewan Kesenian Jakarta. *Adabiyāt: Jurnal Bahasa Dan Sastra*, 1(1), 44–72.
<https://doi.org/10.14421/ajbs.2017.01103>

Zulkarnain, I. (2005) ‘Gerakan Ahmadiyah di Indonesia’. Yogyakarta: Lkis.